

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Subyek Penelitian

Pada bab ini, peneliti akan mebeikan penjelasan terkait profil dari perusahaan media *online* secara singkat yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Kompas.com dan Jubi Papua. Sumber yang dijadikan referensi pada penjelasan profil perusahaan ini didapatkan dari website resmi kedua porta berita *online* dan situs dan sumber terpercaya lainnya.

4.1.1 Kompas.com

Kompas.com adalah perusahaan media yang pertama ada di Indonesia. Pada awalnya kompas.com didirikan sebagai Kompas *Online* pada tanggal 14 september 1995. Kompas *online* pada awalnya dibuat agar dapat emberikan akses kepada konsumen pembaca kompas di daerah yang sulit untuk dijangkau dengan jaringan kompas (Catrina & Sukmana, 2023).

Kompas *online* di tahun 1996, mengubah alamat situ mereka menjadi www.kompas.com yang dimana mnejadi sangart populer dikalangan pembacanya yang berada di luar negeri. Akhirnya di tahun 1998, kompas *online* dapat berkembang dan menjadi unit bisnis dibawah PT. Kompas Cyber Media (KCM). Hasil dari perubahan ini, penikmat koran kompas dapat mengakses berita-berita dari kompas baik ynag sudah dipublikasi sampai ke berita yang paling baru.

Semakin berkembangnya internet di Indonesia dan tren yang terus berubah-ubah tidak membuat kompas menjadi tertinggal, justru dengan adanya perubahan ini kompas semakin meningkatkan dirinya. Melakukan rebranding pada tahun 2008 dengan mengganti dirinya menjadi kompas.com dan menegaskan komitmennya untuk menjadi standar jurnalistik yang berkualitas diterang arus reformasi. Kanal berita yang diperluas dengan menyajikan berita informasi terkini dan relevan kepada pembacanya (Catrina & Sukmana, 2023).

Dalam websitenya, kompas.com mempunyai banyak kanal untuk setiap masing-masing beritanya, mulai dari berita nasional, internasional, berita lokal, dan lain sebagainya. Pada penelitian ini memakai kompas.com sebagai subjek dengan mengategorikan lagi kanal yang dipakai yaitu kanal berita dan nasional terkait pemberitaan penolakan Makan Bergizi Gratis di Papua.

4.1.2 Jubi Papua

Jubi merupakan sebuah media berita yang berbasis di Papua, jubi sendiri merupakan sebuah singkatan dari Juru Bicara. Jubi berfokus pada peristiwa-peristiwa lokal dengan perkpekstif masyarakat yang ada di Papua. Jubi didirikan pada tahun 2001 oleh Victor C. Mambor, berawal dari tabloid mingguan yang didirikan oleh Lembaga swadaya masyarakat (LSM) (Whiteboard Journal & Harsa, 2020).

Pada awalnya Jubi didirikan sebagai media yang advokasi dan mempublikasikan program kerjasama LSM tersebut. Seiring berjalan waktu, Jubi merambatkan medianya dalam bentuk tabloid menjadi bentuk koran dan majalah. Sebagai media yang berfokus di Papua, Jubi menyajikan berita menjadi dua kategori yaitu Tanah Papua yang berfokus untuk menyampaikan berita di setiap provinsinya, sedangkan Berita Papua meliputi beberapa aspek penting seperti sosial, ekonomi, Pendidikan, dan lainnya (Whiteboard Journal & Harsa, 2020)

Tidak hanya itu, Jubi menyediakan kategori otonomi yang dipergunakan menjadi wadah bagi masyarakatnya untuk menyuarkan kondisi atau peristiwa yang terjadi di Papua yang tidak tersorot oleh media lain. Ditambah lagi, Jubi menyediakan kolom Pengalaman untuk mempersilahkan warga sekitar memberikan tulisan-tulisan yang mengangkat kisah mereka yang kurang memiliki kesempatan untuk bersuara di media seperti petani, tenaga medis, seniman, sampai aktivis (Whiteboard Journal & Harsa, 2020).

4.2 Hasil dan Pembahasan

Pada bagian hasil dan pembahasan ini, peneliti menganalisis 13 berita dari Kompas.com dan 13 berita dari Jubi Papua. Analisis dilakukan dengan menggunakan perangkat *framing* dari Robert N. Entman.

4.2.1 Analisis Artikel Berita Kompas.com

a. Analisis berita 1

Judul	: Pelajar Papua Tolak MBG, Mendikdasmen: Program Ini Akan Terus Dievaluasi
Sumber	: Kompas.com
Tanggal	: 04 Februari 2025
Ringkasan	: Mendikdasmen memberikan tanggapan terkait penolakan pelajar di Papua terhadap program Makan Bergizi Gratis. Ia menyatakan bahwa program pemerintah ini untuk meningkatkan kesehatan dan konsentrasi belajar para siswa. Mendikdasmen juga mengatakan program ini masih dalam tahap awal dan akan terus dievaluasi.

Tabel 4.1. Analisis Berita 1 Kompas.com

<i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah)	Isu yang memerlukan evaluasi dan penyempurnaan oleh pemerintah (berfokus pada respon pemerintah terhadap penolakan MBG)
<i>Diagnoses</i> (Memperkirakan Masalah)	<i>Causes</i> (Penyebab) Berbagai kasus dilapangan menjadi masukkan untuk di evaluasi (tidak menyebutkan secara jelas)
<i>Make Moral Judgment</i> (Membuat Keputusan Moral)	Tidak ada nilai moralnya hanya ada penjelasan dari kutipan
<i>Treatment Recommendationa</i> (Penyelesaian Masalah)	Berdasarkan kutipan pelajar: menjelaskan bahwa mereka lebih membutuhkan pendidikan gratis

Sumber: Olahan Peneliti

Berdasarkan hasil dari analisis tabel diatas, dapat melihat:

1. *Define Problem*

Berdasarkan elemen ini, pada berita kompas.com mendefinisikan masalah sebagai sebuah peristiwa atau isu yang diperlukannya evaluasi dan penyempurnaan yang dilakukan oleh pemerintah. “Menteri Pendidikan

Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menyatakan, program makan bergizi gratis (MBG) bakal terus dievaluasi dan disempurnakan demi mendukung kesehatan murid-murid sekolah". Dalam beritanya bahwa Mendikdasmen mengatakan program makan bergizi gratis ini mengalami penolakan karena proqramnya masih pada tahap awal dan perlu di evaluasi oleh pemerintah terkait menyempurnakan teknis pelaksanaan program makan bergizi gratis.

2. ***Diagnose Causes***

Pada elemen ini, dalam penberitaanya tidak dijelaskan secara rinci dan jelas terkait penyebab masalah apakah dari sisi masyarakat dna pelajar atau pemerintah, tetapi dengan memasukkan "Berbagai kasus yang terjadi di lapangan tentu akan menjadi input untuk penyempurnaan program makan bergizi gratis ini pada masa yang akan datang," kata Mendikdasmen. Diarti penyebab diposisikan pada fakta lapangan yang masih perlu adanya penyesuaian, bukan perbedaan kebutuhan pemerintah dan masyarakat papua.

3. ***Make Moral Judgment***

Penulisannya tetap dibuat seperti laporan wawancara tanpa menyampaikan moral dari jurnalis. Jurnalis mengambil penilaian moral berdasarkan pernyataan sesuai dengan apa yang disampaikan melalui kutipan langsung oleh Menteri Abdul Mu'ti "Keterpenuhan gizi memiliki korelasi yang sangat tinggi dengan stamina yang prima," "Stamina yang prima itu sangat mendukung semangat dan energi para murid untuk senantiasa belajar dan bersemangat dalam menuntut ilmu,".

4. ***Treatment Recommendation***

Elemen Treatment Recommendation juga tidak muncul secara jelas oleh jurnalis. Rekomendasi seperti evaluasi dan penyempurnaan program makan bergizi gratis berasal dari kutipan narasumber (Mu'ti). Namun, terdapat *framing* yang secara tidak langsung dengan menyebutkan tuntutan pelajar Papua yang menyatakan mereka lebih membutuhkan Pendidikan gratis daripada makan gratis ” Tuntutan lainnya adalah para pelajar disebut lebih membutuhkan pendidikan yang layak daripada makan gratis”. Meskipun ini

bukan usulan dari jurnalis, pengangkatan narasi tersebut memberi solusi alternatif, yaitu prioritas pada pendidikan. Ini menunjukkan adanya *framing*, namun tetap bukan rekomendasi langsung dari wartawan.

b. Analisis berita 2

Judul : Makan Bergizi Gratis di Papua Dapat Ancaman TPNPB OPM, TNI: Kami Tak Gentar

Sumber : Kompas.com

Tanggal : 04 Februari 2025

Ringkasan : Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua mendapat ancaman dari TPNPB-OPM, yang menolak program tersebut karena menganggap makanan mengandung racun dan dapat merusak generasi muda Papua. Mereka menyebarkan hoaks melalui selebaran dan media sosial, serta mengancam akan membakar sekolah dan membunuh "pengkhianat". Meski demikian, TNI menegaskan akan tetap menjalankan program dengan pengamanan ketat dan terus melakukan pendekatan kepada masyarakat serta guru agar tidak takut menjalankan tugas. Pemerintah menegaskan program ini penting untuk kesejahteraan dan pendidikan anak-anak Papua.

Tabel 4.2. Analisis Berita 2 Kompas.com

<i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah)		Mendefinisikan masalah utama pada ancaman TPNPB OPM terhadap program MBG di Papua
<i>Diagnoses</i> (Memperkirakan Masalah)	<i>Causes</i> (Penyebab)	Penjelasan OPM yang menyebarkan <i>hoaks</i> dan melakukan ancaman terhadap sekolah dan masyarakat
<i>Make Moral Judgment</i> (Membuat Keputusan Moral)		Melalui narasi dan kutipan untuk melihat OPM sebagai pihak yang salah secara moral
<i>Treatment Recommendationa</i> (Penyelesaian Masalah)		Berdasarkan kutipan dari narasumber, memperketat keamanan, sosialisasi kepada guru, melanjutkan program, dan kerja sama seluruh pihak

Sumber: Olahan Peneliti

Berdasarkan hasil dari analisis tabel diatas, dapat melihat:

1. ***Define Problem***

Dalam berita kedua oleh Kompas.com, masalah didefinisikan dengan adanya penolakan pada program makan bergizi gratis di Papua dengan adanya ancaman dari kelompok OPM yang tidak setuju terhadap pelaksanaan program dengan cara mengancam. "Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditujukan untuk anak-anak di Papua mendapat ancaman dari TPNPB OPM." Sebagai kalimat pembuka yang menjadi *framing* awal dengan menegaskan masalah utama adalah gangguan keamanan terhadap program makan bergizi gratis di Papua.

2. ***Diagnoses Causes***

Pada elemen ini, penyebab masalah yang disampaikan dalam pemberitaan kompas.com adalah OPM menolak adanya program makan bergizi gratis ini dengan memberikan berita atau *statement* "Makan itu mengandung bahan berbahaya yang bisa meracuni generasi Papua jangka panjang," kata Undius. Kutipan tersebut secara langsung mengarahkan pembaca untuk melihat TPNPB OPM sebagai penyebab gangguan program makan bergizi gratis.

3. ***Make Moral Judgment***

Jurnalis pada berita ini tidak menyampaikan secara langsung penilaian moralnya, tetapi melalui pilihan narasi dan kutipan yang mengarahkan pembaca untuk melihat OPM sebagai pihak yang salah secara moral seperti kutipan "Sebelumnya, TPNPB OPM Kodap VIII Intan Jaya mengancam akan membakar seluruh sekolah yang ikut menjalankan program makan bergizi gratis."

4. ***Treatment Recommendation***

Jurnalis dalam berita ini juga tidak menyampaikan usulannya terhadap isu ini. Tetapi jurnalis secara tidak langsung memberikan narasi atau ruang kepada pihak TNI untuk menyampaikan solusinya seperti "Pengamanan tetap seperti biasa, melalui jajaran aparat di Polsek, Koramil, dan TNI. Yang terpenting adalah kerja sama dari semua pihak agar program makan bergizi gratis ini bisa berjalan optimal, terutama di daerah rawan seperti Papua" dan

memperketat keamanan, sosialisasi kepada guru, melanjutkan program, dan kerja sama seluruh pihak. *Framing* ini mendorong pembaca untuk menyetujui bahwa pengamanan dan keberanian guru untuk program makan bergizi gratis tetap berjalan.

c. Analisis berita 3

Judul : OPM Tolak MBG dan Ancam Bakar Sekolah, Badan Gizi: Itu Tugas TNI dan Polri

Sumber : Kompas.com

Tanggal : 04 Februari 2025

Ringkasan : Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, memilih untuk tidak memberikan tanggapan atas ancaman dari OPM yang menolak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mengancam akan membakar sekolah. Dadan menyatakan bahwa isu keamanan merupakan tanggung jawab TNI dan Polri, sementara dirinya akan fokus melaksanakan program makan bergizi gratis.

Tabel 4.3. Analisis Berita 3 Kompas.com

<i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah)		Adanya penolakan dan ancaman pembakaran sekolah oleh OPM
<i>Diagnoses</i> (Memperkirakan Masalah)	<i>Causes</i> (Penyebab)	Tidak ada penjelasan dari jurnalis mengenai penyebab OPM menolak MBG
<i>Make Moral Judgment</i> (Membuat Keputusan Moral)		Tidak ada penilaian moral secara langsung maupun tidak langsung oleh jurnalis
<i>Treatment Recommendationa</i> (Penyelesaian Masalah)		Tidak ada saran atau solusi dari jurnalis atau narasumber

Sumber: Olahan Peneliti

Berdasarkan hasil dari analisis tabel diatas, dapat melihat:

1. Define Problem

Pada elemen pertama, pemberitaan ini mendefinisikan masalah pada ancaman OPM terhadap berjalannya program makan bergizi gratis di Papua. Diperkuat dengan adanya beberapa narasi ataupun kutipan yang idmasukkan kedalam berita yaitu,” Sebelumnya, muncul ancaman dari TNPBP OPM Kodap VIII Intan Jaya mengancam akan membakar seluruh

sekolah yang ikut menjalankan program Makan Bergizi Gratis”. “Mereka menilai, program MBG adalah langkah pemerintah untuk meracuni generasi muda di Papua”.

2. ***Diagnoses Causes***

Dalam elemen ini, tidak ada penjelasan dari jurnalis mengenai penyebab mengapa OPM menolak program MBG. Jurnalis hanya menyampaikan bahwa OPM menilai program MBG ini sebagai upaya dari pemerintah untuk meracuni generasi muda “Mereka menilai, program MBG adalah langkah pemerintah untuk meracuni generasi muda di Papua”, tanpa menjelaskan lagi latar belakang atau motif dari OPM.

3. ***Make Moral Judgment***

Pada elemen ini, jurnalis tidak memberikan penilaian moral baik itu secara langsung ataupun tidak langsung terhadap OPM atau pemerintah. Berita ini ditulis dengan netral tanpa membingkai siapa yang benar atau salah secara etis.

4. ***Treatment Recommendation***

Pada elemen terakhir ini, pemberitaan tidak memberikan solusi yang diberikan. Bahkan narasumber yaitu kepala BGN pun tidak memberikan solusi, hanya mengatakan “Ini sudah berkaitan dengan tugas fungsi TNI dan Polri,” kata Dadan dan memilih untuk fokus kepada pelaksanaan program.

d. **Analisis berita 4**

Judul : Tak Hanya soal Keamanan, MBG Butuh Kepercayaan Masyarakat Papua untuk Cegah Penolakan

Sumber : Kompas.com

Tanggal : 05 Februari 2025

Ringkasan : Pengamat militer Khairul Fahmi dari ISESS menyatakan bahwa penanganan penolakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua tidak cukup hanya dengan pendekatan keamanan. Ia mendorong TNI dan Polri untuk mengedepankan komunikasi sosial dan membangun rasa kepemilikan masyarakat terhadap program. Penolakan

makan bergizi gratis, termasuk ancaman dari OPM, juga dikaitkan dengan narasi negatif yang dibentuk untuk melemahkan langkah pemerintah. Fahmi menekankan pentingnya transparansi, pelibatan masyarakat lokal, dan komunikasi yang inklusif agar makan bergizi gratis dapat diterima dan dijalankan dengan aman. Penolakan terhadap makan bergizi gratis, yang sempat viral, juga disertai tuntutan pelajar agar pemerintah memberikan pendidikan gratis yang lebih dibutuhkan daripada makan gratis.

Tabel 4.4 Analisis Berita 4 Kompas.com

<i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah)		Gangguan terhadap program MBG dan kurangnya pendekatan sosial aparat
<i>Diagnoses</i> (Memperkirakan Masalah)	<i>Causes</i> (Penyebab)	Kurangnya komunikasi dan juga adanya narasi negatif dari OPM yang disampaikan melalui kutipan
<i>Make Moral Judgment</i> (Membuat Keputusan Moral)		Jurnalis tidak secara langsung memberikan penilaian, tetapi melalui kutipan narasumber
<i>Treatment Recommendationa</i> (Penyelesaian Masalah)		Ditekankan lewat opini Khairul: solusi pendekatan sosial dan transparansi

Sumber: Olahan Peneliti

Berdasarkan hasil dari analisis tabel diatas, dapat melihat:

1. *Define Problem*

Pada elemen yang pertama ini, jurnalis membuka berita dengan menyatakan bahwa penolakan terhadap program makan bergizi gratis di Papua sudah menimbulkan tuntutan agar TNI dan Polri bisa lebih aktif dalam melakukan pendekatan sosial. TNI dan Polri dituntut untuk lebih turun ke masyarakat usai adanya penolakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua. “Pendekatan keamanan tentu penting, tetapi tidak akan cukup jika tidak diimbangi dengan pendekatan sosial dan komunikasi yang baik,” ujar Pengamat Militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi.”

2. *Diagnoses Causes*

pada elemen ini, jurnalis tidak menyampaikan secara langsung penyebab masalahnya. Penyebab masalah disampaikan oleh narasumber seperti kurangnya komunikasi sosial, dominasi pendekatan represif, dan narasi

negative daeri kelompok tertentu. Jurnalis hanya menyampaikan ulang berdasarka kutipan wawancaranya.

3. *Make Moral Judgment*

Pada elemen ini, ada penilaian moral yang diberikan jurnalis secara tidak langsung melalui pemilihan narasi narasumber yang dikutip. Misalnya, diaktakan bahwa pendekata represif dapat menngkatkan konfil, ini memberikan kesan bahwa pendekatan represif adalah hal yang tidak bijak secara moral.

4. *Treatment Recommendation*

Pada elemen ini, jurnalis tidak memberikan solusi yang ditawarkan. Sokusi justru didapatkan dengan kutipan narasumber dengan jurnalis memberikan ruang untuk pendapatnyan dan ikut membingkai bahwa itu solusi yang baik.

e. Analisis berita 5

Judul • : Polisi diminta Tindak OPM yang Coba Ganggu MBG di Papua
Sumber : Kompas.com
Tanggal : 05 Februari 2025
Ringkasan : Pengamat militer Khairul Fahmi menyarankan agar Polri sebagai penanggung jawab keamanan dalam negeri segera melakukan penegakan hukum terhadap pihak-pihak seperti OPM yang mengancam program Makan Bergizi Gratis di Papua. Ia juga mendorong koordinasi antara TNI, Polri, dan pemda, serta edukasi terhadap masyarakat agar mereka tidak mudah terprovokasi. Penolakan terhadap Makan Bergizi Gratis juga dinilai dipengaruhi oleh narasi negatif yang sengaja dibentuk oleh kelompok tertentu. Sementara itu, pelajar di Yahukimo menuntut agar pemerintah lebih memprioritaskan pendidikan gratis.

Tabel 4.5. Analisis Berita 5 Kompas.com

<i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah)		Ancaman terhadap program MBG dianggap sebagai masalah utama
<i>Diagnoses</i> (Memperkirakan Masalah)	<i>Causes</i> Penyebab	Kurangnya hukum dan keamanan didaerah rawan, dan juga ada narasi negatif yang memprovokasi masyarakat
<i>Make Moral Judgment</i> (Membuat Keputusan Moral)		Melalui penyebutan tindakan “ekstrem”, pembaca diarahkan menyalahkan OPM
<i>Treatment</i> (Penyelesaian Masalah)	<i>Recommendationa</i>	Tidak ada solusi penyelesaian masalah yang diberikan oleh jurnalis

Sumber: Olahan Peneliti

Berdasarkan hasil dari analisis tabel diatas, dapat melihat:

1. ***Define Problem***

Pada elemen ini, jurnalis membuka beritanya dengan menyatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis mendapat ancaman dari OPM di Papua, “Kepolisian Republik Indonesia (Polri) diharapkan dapat melakukan penegakan hukum terhadap pihak yang mengancam keberlangsungan program makan bergizi gratis (MBG), seperti yang dilakukan OPM di Papua.” Hal berikut merupakan *framing* bahwa ancaman terhadap Makan Bergizi Gratis adalah masalah utamanya.

2. ***Diagnoses Causes***

Penyebab masalah dijelaskan oleh Khariul sebagai narasumber dengan mengatakan kurangnya koodinasi, lemahnya edukasi, dan narasi negative yang menyebar. Jadi wartawan hanya mengutip dan tidak menejelaskan sendiri.

3. ***Make Moral Judgment***

Pada elemen ini, tidak ada kalimat secara langsung yang diberikan oleh jurnalis. Namun, pilihan narasi seperti “mengancam”, “tindakan ekstrem” dan “perlu ditekankan” memberikan kesan bahwa tindakan OPM itu salah atau membahayakan. "Polri, sebagai penanggung jawab keamanan dalam negeri, harus menjadi ujung tombak dalam penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang mengancam jalannya program MBG." "Ancaman terhadap program MBG tidak hanya berupa gangguan fisik, tetapi juga pembentukan narasi negatif oleh kelompok tertentu yang berupaya menghalangi langkah pemerintah pusat." "Dalam pemberitaan terpisah, OPM secara tegas menolak pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis dan

mengancam akan melakukan tindakan ekstrem, termasuk menembak hingga membakar gedung sekolah...".

4. Treatment Recommendation

Pada elemen terakhir ini, tidak ada solusi yang diberikan oleh jurnalis untuk isu ini. Solusi yang ada berasal dari narasumber yaitu Khairul Fahmi, jurnalis tidak memberikan solusi, tetapi memberikan ruang untuk narasumbernya.

f. Analisis berita 6

Judul : Pelajar di Papua Tolak MBG, Mentri PPPA: Mungkin Belum Tahu Niat Baik Presiden

Sumber : Kompas.com

Tanggal : 05 Februari 2025

Ringkasan : Menteri PPPA Arifah Fauzi menanggapi penolakan Makan Bergizi Gratis oleh pelajar Papua dengan menyatakan bahwa hal tersebut tidak bisa dinilai sepihak. Ia menduga bahwa pelajar belum memahami sepenuhnya tujuan baik program tersebut. Arifah menekankan bahwa Makan Bergizi Gratis penting untuk pemenuhan gizi sejak dini dan merupakan bagian dari visi Presiden. Ia menolak untuk berkomentar lebih jauh dan menganggap masalah ini perlu dikaji dari berbagai perspektif.

Tabel 4.6. Analisis Berita 6 Kompas.com

<i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah)		Penolakan pelajar terhadap MBG di Papua (Yahukimo) yang ingin pendidikan gratis
<i>Diagnoses</i> (Memperkirakan Masalah)	<i>Causes</i> (Penyebab)	Diambil dari narasumber, mengatakan pelajar belum memahami tujuan dan maksud program MBG dan tidak tau niat baik pemerintah
<i>Make Moral Judgment</i> (Membuat Keputusan Moral)		Melalui narasi atau kutipan “niat baik” dari pemerintah
<i>Treatment Recommendationa</i> (Penyelesaian Masalah)		Evaluasi dan penyempurnaan, serta menjelaskan pelajar lebih membutuhkan pendidikan gratis

Sumber: Olahan Peneliti

Berdasarkan hasil dari analisis tabel diatas, dapat melihat:

1. ***Define Problem***

Jurnalis membuka beritanya dengan menyatakan bahwa adanya penolakan program Makan Bergizi Gratis oleh pelajar Papua, yang mendapatkan tanggapan dari pemerintah. “Menteri Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (Kemen PPPA) Arifah Fauzi memberikan tanggapan terkait penolakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh pelajar di Papua.”

2. ***Diagnoses Causes***

Pada elemen ini, jurnalis mengutip dari narasumber yang menyampaikan bahwa kemungkinan penolakan terjadi karena pelajar belum memahami tujuan dari program Makan Bergizi Gratis.

3. ***Make Moral Judgment***

Pada elemen ini, tidak ada kalimat dari jurnalis yang mengatakan benar atau salah secara langsung. Tetapi, melalui kutipan narasumber “yang dilihat adalah niat baik.”, seolah mengarahkan pembaca untuk menilai bahwa program MBG adalah bertujuan positif.

4. ***Treatment Recommendation***

Pada elemen ini, jurnalis mengambil kutipan dari narasumber yang memberikan solusi berupa program Makan Bergizi Gratis akan dievaluasi dan disempurnakan.

g. **Analisis berita 7**

Judul : Makan Bergizi Gratis di Papua Ditolak OPM, TNI Tingkatkan Pengamanan Sekolah

Sumber : Kompas.com

Tanggal : 05 Februari 2025

Ringkasan : Mabes TNI merespons ancaman OPM yang ingin membakar sekolah pelaksana Makan Bergizi Gratis dengan meningkatkan pengamanan di wilayah rawan. Kapuspen TNI Mayjen Hariyanto menyebut TNI bekerja sama dengan Polri dan pemda, serta mengedepankan pendekatan keamanan yang terukur dan humanis. Patroli

ditingkatkan, tindakan preventif dilakukan, dan sinergi dengan tokoh masyarakat terus dibangun untuk menjaga stabilitas. Masyarakat diimbau tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh informasi tidak jelas.

Tabel 4.7. Analisis Berita 7 Kompas.com

<i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah)		Ancaman OPM untuk membakar sekolah yang melaksanakan MBG
<i>Diagnoses</i> (Memperkirakan Masalah)	<i>Causes</i> (Penyebab)	Tidak dijelaskan alasan/motif OPM dari sisi jurnalis/OPM menilai MBG sebagai racun untuk generasi muda
<i>Make Moral Judgment</i> (Membuat Keputusan Moral)	<i>Framing</i>	ancaman kekerasan menimbulkan kesan tindakan OPM yang tidak bermoral
<i>Treatment Recommendationa</i> (Penyelesaian Masalah)		Meningkatkan pengamanan dan koordinasi

Sumber: Olahan Peneliti

Berdasarkan hasil dari analisis tabel diatas, dapat melihat:

1. ***Define Problem***

Pada elemen ini, masalah utama di definisikan dari awal beritanya, dengan menuliskan ancaman pembakaran sekolah oleh OPM terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Kalimat pembuka ini sudah menunjukkan ini adalah isu keamanan yang serius. “Markas Besar (Mabes) TNI meningkatkan pengamanan di sekolah-sekolah usai Organisasi Papua Merdeka (OPM) mengancam bakal membakar sekolah yang menerapkan program Makan Bergizi Gratis (MBG).”

2. ***Diagnoses Causes***

Untuk elemen ini tidak dijelaskan kenapa OPM menolak atau mengancam program Makan Bergizi Gratis ini. Narasi hanya menyebutkan fakta ancaman, tanpa memberikan konteks penyebabnya. Jurnalis juga secara tidak langsung mengatakan penyebab konflik berdasarkan OPM bahwa program MBG adalah alat untuk meracuni generasi muda Papua, hal itu merupakan *diagnose causes* dari actor bukan dari jurnalis.

3. ***Make Moral Judgment***

Jurnalis menyebutkan OPM mengancam “membakar sekolah” dan juga menyebarkan tuduhan bahwa Makan Bergizi Gratis dapat “meracuni generasi muda”. Hal itulah yang memberikan kesan bahwa tindakan OPM

berbahaya dan ekstrem. Meskipun tidak secara langsung menyebutkan kata “salah”, *framing* ini membentuk opini moral pembaca bahwa tindakan OPM tidak bisa dibenarkan.

4. *Treatment Recommendation*

Pada elemen ini, jurnalis menyampaikan solusi melalui kutipan dari narasumber TNI yang menyampaikan bahwa mereka akan meningkatkan pengamanan, melakukan patroli, pendekatan humanis, dan kerjasama dengan polri dan tokoh masyarakat.

h. Analisis berita 8

Judul : Aliansi Pelajar Papua Tolak MBG, KPAI Minta Pemerintah Dengarkan

Sumber : Kompas.com

Tanggal : 11 Februari 2025

Ringkasan : KPAI meminta pemerintah untuk mendengar pendapat anak-anak terkait program Makan Bergizi Gratis, termasuk jika mereka menolaknya. Jasra Putra dari KPAI mendorong pembentukan forum partisipasi anak agar mereka bisa menyampaikan pandangan. KPAI menilai partisipasi ini penting agar pelaksanaan Makan Bergizi Gratis tidak salah arah. Sementara itu, Komisioner KPAI lainnya, Sylvana Maria, mengingatkan agar suara anak tidak ditunggangi kepentingan orang dewasa, karena belum ada kejelasan apakah penolakan di Yahukimo benar berasal dari anak-anak.

Tabel 4.4. Analisis Berita 8 Kompas.com

<i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah)	Penolakan MBG dan kurangnya partisipasi anak
<i>Diagnoses</i> (Memperkirakan Masalah)	<i>Causes</i> (Penyebab) KPAI mengatakan penolakan mungkin terjadi karena kurang partisipasi pelajar dalam proses pengambilan keputusan dan intervensi orang dewasa
<i>Make Moral Judgment</i> (Membuat Keputusan Moral)	KPAI mengatakan prinsip mereka salah satunya mendengarkan suara anak
<i>Treatment Recommendationa</i> (Penyelesaian Masalah)	KPAI menyarankan membentuk forum partisipasi anak

Sumber: Olahan Peneliti

Berdasarkan hasil dari analisis tabel diatas, dapat melihat:

1. ***Define Problem***

Masalah utamanya didefinisikan sebagai penolakan pelajar Papuan terhadap program Makan Bergizi Gratis, serta kurangnya partisipasi anak dalam program BMG ini. Disampaikan langsung pada paragraph awal sebagai isu yang aktual. “Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendorong pemerintah mendengarkan pendapat anak mengenai program makan bergizi gratis (MBG), termasuk apabila ada aspirasi penolakan terkait program tersebut.”

2. ***Diagnoses Causes***

Pada elemen ini, jurnalis memilih penyebab masalah berdasarkan kutipan dari wawancara bersama dengan KPAI yang menyatakan bahwa penolakan muncul mungkin karena pelajar tersebut tidak dilibatkan dalam program Makan Bergizi Gratis atau aspirasi mereka yang tidak terlalu dianggap penting oleh orang dewasa/pemerintah.

3. ***Make Moral Judgment***

Pada elemen ini, penilaian moral dipilih melalui kutipan Jasra “Jangan sampai tujuan mulia kita adalah memberikan pemenuhan gizi kepada anak-anak kita yang berada di sekolah, tapi justru terjadi sebaliknya, terjadi penolakan.” Jurnalis tidak mengatakan secara langsung, tetapi pemilihan kutipan tersebut memberikan kesan kalau mengabaikan suara pelajar adalah hal yang keliru.

4. ***Treatment Recommendation***

Pada elemen ini, jurnalis hanya melaporkan dan mengambil saran dari KPAI yaitu dengan membentuk forum anak dan mendengarkan aspirasi mereka, agar program Makan Bergizi Gratis dapat di terima dengan baik.

i. **Analisis berita 9**

Judul : Demo Tolak MBG di Papua, Istana: Itu Menghalangi Hak yang Lain

Sumber : Kompas.com

Tanggal : 17 Februari 2025

Ringkasan : Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi merespons aksi demonstrasi pelajar Papua yang menolak Makan Bergizi Gratis dan menyebabkan bentrok dengan aparat. Ia menyatakan bahwa menolak program adalah hak setiap warga, tapi tidak boleh menghalangi hak orang lain yang ingin menerima manfaat Makan Bergizi Gratis. Hasan menekankan pentingnya menyampaikan pendapat secara damai dan tidak mengganggu orang lain. Sementara itu, para pelajar menyampaikan bahwa dana Makan Bergizi Gratis tidak menyentuh akar persoalan di Papua, seperti buta huruf, kemiskinan, dan pendidikan mahal. Mereka menuntut pendidikan gratis sebagai prioritas.

Tabel 4.9. Analisis Berita 9 Kompas.com

<i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah)		Adanya penolakan MBG dan terjadi bentrok dengan aparat
<i>Diagnoses</i> (Memperkirakan Masalah)	<i>Causes</i> Penyebab	Penyebab masalah diambil dari kutipan seorang pelajar yaitu kemiskinan, buta huruf, dan biaya sekolah yang mahal
<i>Make Moral Judgment</i> (Membuat Keputusan Moral)		Diambil dari kutipan Hasan Nasbi yang mengatakan penolakan dan kekerasan = salah, dan hak orang lain harus dihormati
<i>Treatment Recommendationa</i> (Penyelesaian Masalah)		Penyelesaian masalah diambil dari kutipan Hasan Nasbi: unjuk rasa boleh, asal tidak menghalangi hak orang lain

Sumber: Olahan Peneliti

Berdasarkan hasil dari analisis tabel diatas, dapat melihat:

1. ***Define Problem***

Pada elemen pertama, masalah didefinisikan dengan jelas diawal dengan paragraph pembukanya yang menyatakan adanya kasi demostrasi penolakan Makan Bergizi Gratis di Papua, “Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi angkat bicara perihal aksi demonstrasi untuk menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua.”

2. ***Diagnoses Causes***

Penyebab dijelaskan berdasarkan kutipan dari pelajar yang mengatakan bahwa Makan Bergizi Gratis tidak tepat sasaran, karena angka buta huruf, kemiskinan tinggi, biaya sekolah yang mahal, dan guru tidak aktif. “Ia menyampaikan, angka buta huruf dan angka kemiskinan di Tanah Papua

menduduki peringkat pertama di Indonesia, dibandingkan dengan provinsi lain. Selain itu, biaya sekolah mahal dan guru-guru yang tidak mengajar aktif.” Jurnalis hanya menjelaskan dan melaporkan kutipan ini, dan tidak menganalisis secara mendalam.

3. *Make Moral Judgment*

Pada elemen ini, jurnalis tidak secara langsung mengatakan benar atau salah, tetapi melalui kutipan yang dipilih yaitu kutipan Hasan Nasbi terkait "Gini, kalau masyarakat mau berunjuk rasa dan menyampaikan pendapat, silakan. Tapi, jangan sampai melakukan kekerasan." "Tapi, kalau sampai berunjuk rasa untuk membatalkan dan menolak itu, berarti menghalangi hak-hak saudara-saudara yang lain untuk mendapatkan layanan makan bergizi gratis." Dari pemilihan narasi dan kutipan, mengarahkan pembaca kalau penolakan dengan kekerasan adalah salah dan menghalangi hak orang lain juga salah.

4. *Treatment Recommendation*

Pada elemen ini, rekomendasi yang dipilih oleh jurnalis diambil dari kutipan dari Hasan Nasbi, bukan opini dari jurnalis atau media. Hasan mengatakan kalau boleh saja melakukan unjuk rasa dengan cara yang damai dan tidak menghalangi hak orang lain, dan jika menolak Makan Bergizi Gratis cukup saja dengan tidak menerimanya. "Kalau ada yang nolak MBG karena itu hak mereka, boleh tak menerima." "Tapi, jangan sampai menghalangi hak saudara dan teman-teman mereka mendapatkan makan bergizi gratis. Kalau ada orang yang bilang mereka enggak perlu, mereka bisa sampaikan hal itu. Bisa bilang, 'kami enggak usah dikasih', enggak apa-apa."

j. Analisis berita 10

Judul : Respons Gerinda soal Demo Tolak Makan Bergizi Gratis di Papua

Sumber : Kompas.com

Tanggal : 17 Februari 2025

Ringkasan : Ketua DPP Gerindra Supratman Andi Agtas menilai penolakan terhadap Makan Bergizi Gratis adalah hal wajar

dalam dinamika kebijakan baru. Ia menyarankan pemerintah memperkuat sosialisasi mengenai tujuan Makan Bergizi Gratis untuk meningkatkan kualitas SDM. Menurutnya, Makan Bergizi Gratis adalah program unggulan jangka panjang yang hasilnya tidak bisa dilihat dalam waktu singkat. Ia yakin masyarakat akan memahami manfaatnya seiring waktu, sembari menegaskan bahwa persoalan di awal pelaksanaan merupakan hal biasa.

Tabel 4.10. Analisis Berita 10 Kompas.com

<i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah)	Adanya penolakan MBG dan respon dari pemerintah, terutama dari partai gerindra
<i>Diagnoses</i> (Memperkirakan Masalah)	<i>Causes</i> (Penyebab Masalah)
<i>Make Moral Judgment</i> (Membuat Keputusan Moral)	Melalui kutipan DPP Gerindra yang mengatakan MBG adalah program andalan, jadi protes adalah hal wajar
<i>Treatment Recommendationa</i> (Penyelesaian Masalah)	Melalui kutipan dari DPP Gerindra dengan perlunya sosialisasi yang lebih intens dan harus menunggu hasil jangka panjangnya

Sumber: Olahan Peneliti

Berdasarkan hasil dari analisis tabel diatas, dapat melihat:

1. ***Define Problem***

Pada elemen ini, masalah utama didefinisikan pada bagial awal, penolakan Makan Bergizi Gratis oleh pelajar Papua dan reaksi masyarakat terhadap program baru. Jurnalis memaparkan dengan aksi demonstrasi dan juga kutipan tanggapan terkait demo tersebut.

2. ***Diagnoses Causes***

Pada elemen ini, penyebab masalah diambil dari kutipan DPP Gerindra yaitu “Ya biasanya dinamika ya. Jadi ya dijelaskan tujuan dari program makan bergizi gratis itu dalam rangka untuk meningkatkan kebutuhan gizi masyarakat.” Yang menjelaskan bahwa penolakan muncul karena masyarakat belum memahami tujuan program Makan Bergizi Gratis. “Menurut dia, reaksi masyarakat terhadap program baru pemerintah pasti beragam, sehingga diperlukan sosialisasi yang lebih intensif untuk menjelaskan tujuan program tersebut.” Menjelaskan karena Makan Bergizi Gratis adalah program baru dan sosialisasinya asih minim, maka wajar jika masyarakat ada yang menolak.

3. ***Make Moral Judgment***

Pada elemen ini, jurnalis tidak secara langsung bilang benar atau salah nya, tetapi melalui kutipan dari DPP Gerindra yaitu Hasan Nasbi, pembaca diarahkan oleh jurnalis unyuk menilai bahwa penolakan dengan kekerasan itu adalah hal yang salah, dan menghalangi hak orang lain jugalah salah. Jurnalis tidak menuliskan pendapatnya sendiri, tapi dari cara narasi dan pilihan kutipannya.

4. ***Treatment Recommendation***

Rekomendasi yang diberikan oleh jurnalis, diambil dari kutipan wawancara Hasan Nasbi, “Reaksi masyarakat terhadap program baru pemerintah pasti beragam, sehingga diperlukan sosialisasi yang lebih intensif untuk menjelaskan tujuan program tersebut.” Hal ini menjelaskan bahwa penolakan terjadi karena masyarakat belum paham dari tujuan program Makan Bergizi Gratis, dan juga sosialisasi yang lebih sering dan jelas juga diharapkan membuat masyarakat menjadi paham dengan programnya.

k. **Analisis berita 11**

Judul : Wamendagri Sebut Penolakan MBG di Papua Hanya Masalah Komunikasi

Sumber : Kompas.com

Tanggal : 18 Februari 2025

Ringkasan : Wamendagri Bima Arya menyatakan bahwa penolakan Makan Bergizi Gratis di Papua hanya disebabkan oleh masalah komunikasi. Pemerintah berencana melakukan sosialisasi lebih lanjut melalui forum retreat kepala daerah agar pemahaman masyarakat meningkat. Ia juga menyebutkan bahwa walaupun Papua merupakan daerah otonomi khusus, tetap diperlukan dialog dan negosiasi agar program Makan Bergizi Gratis bisa dijalankan dengan baik.

Tabel 4.11. Analisis Berita 11 Kompas.com

<i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah)		Penolakan MBG di Papua dianggap adanya <i>miss</i> komunikasi antara pemerintah dan masyarakat
<i>Diagnoses</i> (Memperkirakan Masalah)	<i>Causes</i> (Penyebab Masalah)	Jurnalis mengutip dari wamendagri yang menjelaskan penolakan terjadi karena masalah komunikasi
<i>Make Moral Judgment</i> (Membuat Keputusan Moral)		Berdasarkan kutipan dari Wamendagri yang menganggap penolakan karena kurang paham terkait program MBG
<i>Treatment Recommendationa</i> (Penyelesaian Masalah)		Solusi diberikan dari kutipan Wamendagri, yaitu: sosialisasi, orientasi kepala daerah

Sumber: Olahan Peneliti

Berdasarkan hasil dari analisis tabel diatas, dapat melihat:

1. *Define Problem*

Pada elemen ini, masalah yang diangkat adalah terkait pelajar Papua yang menolak program Makan Bergizi Gratis. jurnalis menuliskan fakta penolakan dan aksi demonstrasinya. "Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya, menyebut penolakan program makan bergizi gratis (MBG) di Papua hanya karena masalah komunikasi." Berdasarkan kalimat tersebut merupakan narasi dari jurnalis, yang menegaskan fakta terkait adanya penolakan Makan Bergizi Gratis di Papua. Jurnalis juga tidak menutip dari Wamendagri saja, tapi juga menuliskan kronologi penolakannya, "Sebelumnya, massa pelajar dari berbagai sekolah yang ada di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, melakukan aksi demonstrasi menolak MBG di halaman Kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Senin (17/2/2025)."

2. *Diagnoses Causes*

Pada elemen ini, penyebabnya tidak diuraikan oleh jurnalisnya, melainkan dijelaskan dalam kutipan wawancara oleh wamendagri "Ya, itu kan masalah komunikasinya saja," dijelaskan bahwa masalah utamanya karena komunikasi yang kurang baik, bukan karena program Makan Bergizi Gratis nya.

3. *Make Moral Judgment*

Wartawan tidak menulis secara langsung siapa benar atau salah, tapi cara penulisan dan kutipan Wamendagri memberikan kesan bahwa menolak Makan Bergizi Gratis hanya karena adanya miskomunikasi itu tiddak bisa menjadi dasar.

4. *Treatment Recommendation*

Solusi yang diberikan dalam berita ini, diambil dari kutipan Wamendagri yang dilaporkan oleh jurnalis seperti "Nanti kepala daerahnya di sana (Papua) di retreat akan diberikan pemahaman, nanti akan disosialisasikan dengan lebih baik." Menjelaskan nantinya akan di adakan *retreat* antara kepala daerah di Papua yang akan diberikan pemahaman yang lebih luas terkait program Makan Bergizi Gratis, nantinya para kepala daerah dapat mensosialisasikan program Makan Bergizi Gratis ini dengan baik kepada para pelajar dan masyarakat.

1. Analisis berita 12

- Judul : Demo Tolak MBG di Papua, Gibran: Makan Bergizi Gratis Penting, Pendidikan Penting
- Sumber : Kompas.com
- Tanggal : 18 Februari 2025
- Ringkasan : Wapres Gibran menegaskan pentingnya program Makan Bergizi Gratis, pendidikan gratis, dan layanan kesehatan gratis. Ia menyatakan bahwa masukan dan evaluasi dari masyarakat akan ditampung dan dibahas bersama Presiden. Pernyataan ini diberikan sebagai respons atas penolakan Makan Bergizi Gratis oleh pelajar di Papua, yang menuntut agar dana digunakan untuk pendidikan gratis.

Tabel 4.12. Analisis Berita 12 Kompas.com

<i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah)		Penolakan MBG di Papua oleh pelajar dan direspon oleh Wapres Gibran
<i>Diagnoses</i> (Memperkirakan Masalah)	<i>Causes</i> Penyebab	Penyebab penolakan dikutip dari pelajar Papua yaitu angka buta huruf yang tinggi, kemiskinan, biaya sekolah mahal, guru tidak aktif,. Menjadikan MBG dianggap tidak tepat sasaran
<i>Make Moral Judgment</i> (Membuat Keputusan Moral)		Melalui kutipan Gibran "Makan bergizi gratis penting" "pendidikan gratis penting"
<i>Treatment Recommendationa</i> (Penyelesaian Masalah)		Gibran mengatakan akan menampung aspirasi masyarakat dan membahas dengan Presiden

Sumber: Olahan Peneliti

Berdasarkan hasil dari analisis tabel diatas, dapat melihat:

1. ***Define Problem***

Pada elemen ini, masalah yang diangkat oleh jurnalis adalah pelajar Papua yang menolak program Makan Bergizi Gratis, terjadinya demonstrasi, dan bentrok. Jurnalis membuka berita dengan respon dari wakil presiden Gibran terhadap aksi demo di Papua. "Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa program makan bergizi gratis (MBG) adalah hal yang penting."

2. ***Diagnoses Causes***

Pada elemen ini, jurnalis juga menuliskan berdasarkan kutipan dari pelajar Papua, "Menurut Rohex, dana sebesar Rp 71 triliun tidak akan berguna bagi siswa-siswi di Tanah Papua jika hanya untuk MBG. Angka buta huruf dan angka kemiskinan di Tanah Papua menduduki peringkat pertama di Indonesia, biaya sekolah mahal dan guru-guru yang tidak mengajar aktif." yang menjelaskan bahwa angka buta huruf di Papua semakin tinggi, angka kemiskinan di Papua juga menduduki peringkat pertama di Indonesia, diperparah dengan biaya sekolah yang mahal dan guru yang tidak aktif dalam proses mengajarnya.

3. ***Make Moral Judgment***

Jurnalis tidak menuliskan secara langsung terksit penilaian moral. Tapi kutipan dari Gibran yang dipilih oleh jurnalis menegaskan bahwa ada tiga hal yang penting yaitu makan bergizi gratis itu penting, Pendidikan gratis penting, dan pemerintah juga terbuka pada masukan. "Sekali lagi, makan bergizi gratis penting." Jadi, program Makan Bergizi Gratis di nilai positif, protes seharusnya dilihat sebagai bahan evaluasi oleh pemerintah.

4. ***Treatment Recommendation***

Berdasarkan berita, solusi diberikan melalui kutipan Gibran yaitu masukan dan evaluasi masyarakat yang ditampung, akan menindaklanjuti penolakan Makan Bergizi Gratis di Papua bersama Presiden, dan program Makan Bergizi Gratis tetap jalan dengan adanya evaluasi. "Dan terima kasih sekali untuk masukan evaluasi dari warga. Nanti akan kami tampung dan akan kita

tindak lanjuti bersama Pak Presiden, sesuai instruksi dan perintah dari Pak Presiden."

m. Analisis berita 13

Judul : Makanan Bergizi Gratis ditolak di Papua, Badan Gizi: Belum Tahu Manfaatnya

Sumber : Kompas.com

Tanggal : 28 Februari 2025

Ringkasan : Dadan Hindayana menyebut penolakan Makan Bergizi Gratis di Papua kemungkinan terjadi karena masyarakat belum tahu manfaatnya. Ia mengatakan BGN tidak akan memaksa mereka yang menolak, tapi tetap akan melakukan pendekatan persuasif. BGN menekankan bahwa Makan Bergizi Gratis penting untuk pembangunan SDM masa depan dan menjadi hak semua anak di Indonesia.

Tabel 4.13. Analisis Berita 13 Kompas.com

<i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah)	Penolakan MBG di Papua oleh pelajar sampai terjadi demo dan bentrok
<i>Diagnoses</i> (Memperkirakan Masalah)	<i>Causes</i> (Penyebab) Diambil dari kutipan kepala BGN: penolakan karena belum tahu manfaatnya. Sedangkan kutipan dari pelajar: masalah pendidikan, kemiskinan, dan biaya sekolah mahal sampai guru tidak aktif
<i>Make Moral Judgment</i> (Membuat Keputusan Moral)	Lewat kutipan BG: diartikan menolak dianggap karena belum paham, bukan karena programnya yang buruk
<i>Treatment Recommendationa</i> (Penyelesaian Masalah)	Diambil dari kepala BGN: akan dilakukan dengan persuasif dengan pemerintah daerah Papua

Sumber: Olahan Peneliti

Berdasarkan hasil dari analisis tabel diatas, dapat melihat:

1. Define Problem

Pada elemen ini, masalah dijelaskan oleh jurnalis bahwa pelajar di Papua menolak Makan Bergizi Gratis dengan mengadakan demo dan sempat terjadi bentrok dengan aparat setempat. Jurnalis membuka berita dengan respon kepala Badan Gizi Nasional, lalu menulis kronologi demonya. "Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan, orang-orang

yang menolak makan bergizi gratis di Papua kemungkinan belum tahu manfaat dari program tersebut.”

2. *Diagnoses Causes*

Pada elemen ini, jurnalis menyajikan penyebab yang muncul dari dua pihak yang berbeda dan disampaikan lewat kutipan. Dari kepala BGN menjelaskan bahwa penolakan terjadi karena pelajar belum paham terkait manfaat dari program Makan Bergizi Gratis. Sedangkan dari pelajar, menjelaskan bahwa angka buta huruf yang tinggi, kemiskinan masyarakat Papua, biaya sekolah yang mahal, dan guru yang tidak aktif. Menurut mereka dana Makan Bergizi Gratis dinilai tidak menjawab atau mengatasi permasalahan di Papua. “Nanti yang berhaknya menolak, ya sementara kami maklumi. Dan mungkin belum tahu manfaatnya.” “Menurut Rohex, dana sebesar Rp 71 triliun tidak akan berguna... angka buta huruf... biaya sekolah mahal...”

3. *Make Moral Judgment*

Pada elemen ini, penilaian moral tidak ditulis langsung oleh jurnalis, tetapi melalui pemilihan kutipan oleh kepala BGN terkait Makan Bergizi Gratis adalah hak dari anak, Makan Bergizi Gratis itu penting untuk membangun SDM yang berkualitas, dan menganggap yang menolak itu dianggap wajar karena belum paham. “Dan ini adalah hak setiap anak di Indonesia untuk mendapatkan makanan yang berkualitas.” Program Makan Bergizi Gratis ini dianggap tidak salah secara moral, Makan Bergizi Gratis adalah program yang baik dan penolakan terjadi karena miskomunikasi.

4. *Treatment Recommendation*

Pada elemen ini, solusi yang diberikan oleh jurnalis hanya menuliskan kutipan dari kepala BGN dan tidak menambahkan saran apapun. Kepala BGN menjelaskan akan melakukan persuasi dengan pemerintah daerah secara persuasif, tidak akan menolak pelajar yang menolak Makan Bergizi Gratis karena itu adalah hak mereka, dan juga akan terus mengedukasi manfaat Makan Bergizi Gratis kepada pelajar dan masyarakat. “Nanti kami secara persuasif dengan pemerintah daerah akan menyampaikan hal-hal

terkait makan bergizi.” “Tapi kami akan persuasi karena pentingnya untuk generasi mendatang.”

4.2.2 Analisis Artikel Berita Jubi Papua

a. Analisis berita 1

Judul : Badan Gizi Nasional Nyatakan Tetap Jalankan Perogram Makan Siang Gratis di Tanah Papua

Sumber : Jubi Papua

Tanggal : 18 Februari 2025

Ringkasan : Berita ini mengangkat tanggapan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, terhadap penolakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai wilayah Papua. Dadan menegaskan bahwa BGN tetap akan melanjutkan program Makan Bergizi Gratis dengan target 1,5 juta siswa, namun tetap menghormati warga yang menolak. Ia menyatakan bahwa gizi adalah hak setiap anak. Dosen UNIPA, Agus Sumule, menilai kurangnya sosialisasi pemerintah daerah menjadi penyebab penolakan. Ia menekankan pentingnya pelibatan pemma dalam program. Sementara itu, sejumlah pelajar di Jayapura dan daerah lain melakukan aksi penolakan, menuntut pendidikan gratis. Pastor Yance Wadogouby di Intan Jaya menyatakan program Makan Bergizi Gratis tidak relevan di daerah konflik, dan lebih mendesak untuk mengaktifkan kembali layanan pendidikan yang terhenti.

Tabel 4.14. Analisis Berita 1 Jubi Papua

<i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah)		Penolakan pelajar terhadap MBG dan adanya <i>miss</i> komunikasi
<i>Diagnoses</i> (Memperkirakan Masalah)	<i>Causes</i> Penyebab	Kurangnya sosialisasi, adanya konflik daerah, dan kurang hadirnya pejabat
<i>Make Moral Judgment</i> (Membuat Keputusan Moral)		Kritik terhadap prioritas pemerintah dan ketidakhadiran aparaturng lokal

<i>Treatment</i> (Penyelesaian Masalah)	<i>Recommendation</i>	Usulan agar fokus pada pendidikan dan mendengarkan aspirasi
--	-----------------------	---

Sumber: Olahan Peneliti

Berdasarkan hasil dari analisis tabel diatas, dapat melihat:

1. *Define Problem*

Dalam elemen ini, jurnalis dan media membingkai masalah sebagai penolakan pelajar papua terhadap program Makan Bergizi Gratis dan ketidaksiapan pemerintah dalam mensosialisasikan programnya. "Pada Senin (17/2/2025), para siswa di berbagai kabupaten/kota di Tanah Papua menggelar demonstrasi damai menolak program Makan Bergizi Gratis atau MBG." "Agus menilai sosialisasi MBG di Tanah Papua masih kurang." Jurnalis juga menekankan bahwa penolakan Makan Bergizi Gratis bukan hanya aksi spontan yang dilakukan oleh siswa, tetapi menunjukkan adanya kesenjangan komunikasi dan kebijakan antara pemerintah pusat dan masyarakat papua.

2. *Diagnoses Causes*

Pada elemen ini, jurnalis melalui kutipan narasumber dan pengembangan narasinya menggiring pembaca untuk melihat akar permasalahannya. Seperti kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah, minim pelibatan masyarakat lokal, dan kondisi Papua sebagai wilayah konflik. "Pemerintah daerah harus bisa memberikan penjelasan/sosialisasi [program Makan Bergizi Gratis] kepada masyarakat [maupun pelajar]," kata Agus kepada Jubi. "program itu tidak relevan dengan kondisi Intan Jaya sebagai daerah konflik bersenjata". Jurnalis tidak hanya menyampaikan fakta penolakan, tapi juga memasukkan penyebab yang kompleks, seperti militer, konflik daerah, dan tidak aktif pemerintah daerah.

3. *Make Moral Judgment*

Dalam elemen ini, penilaian moral yang diberikan oleh Jubi adalah penilaian yang tidak terlihat secara langsung. Terdapat penilaian seperti pemilihan narasumber yang mengkritik program Makan Bergizi Gratis dan penekanan pada aspirasi pelajar dan kondisi lokal yang diabaikan. "Untuk apa pemekaran kabupaten/provinsi, kalau pejabat tidak ada di tempat." "Kami bukan membutuhkan makanan bergizi gratis," katanya. Dari itu

terlihat bahwa jurnalis dan media memihak pada perspektif lokal dan mengarahkan pembaca untuk mempertanyakan prioritas kebijakan pemerintah pusat terhadap Papua.

4. *Treatment Recommendation*

Pada elemen ini, ada beberapa saran atau solusi yang diberikan dari narasumber yang dipilih dan disorot oleh jurnalis, yaitu perlu sosialisasi menyeluruh dari pemerintah daerah, pemerintah harus mendengarkan aspirasi pelajar, dan prioritaskan Pendidikan dan pengaktifan sekolah di wilayah konflik. “Pemerintah daerah juga berkewajiban menerima aspirasi memang ada yang [menolak]. [Dan] harus dijelaskan dengan baik. Kegiatan [program makan bergizi gratis] harus dikomunikasikan, disosialisasikan dengan baik.” Media memberikan ruang untuk narasumber menyampaikan rekomendasi.

b. Analisis berita 2

Judul : Rakyat Berhak Menolak Program Makan Bergizi Gratis.
Sumber : Jubi Papua
Tanggal : 18 Februari 2025
Ringkasan : Berita ini memuat kritik dari Aktivis 98, Aznil Tan, terhadap pernyataan Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, yang menyebut penolakan Makan Bergizi Gratis sebagai upaya menghalangi hak rakyat. Aznil menilai pernyataan tersebut berpotensi memecah belah masyarakat karena menciptakan dikotomi pro-rakyat dan anti-rakyat. Ia menegaskan bahwa rakyat berhak menolak Makan Bergizi Gratis karena didanai dari anggaran negara, bukan dana pribadi presiden. Aznil juga menilai Makan Bergizi Gratis berisiko menjadi program pencitraan tanpa dampak nyata jika tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan. Ia menegaskan bahwa penolakan pelajar adalah bentuk pengawasan

publik dan bagian dari hak demokrasi yang seharusnya dihargai oleh pemerintah.

Tabel 4.15. Analisis Berita 2 Jubi Papua

<i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah)	Masalah didefinisikan sebagai narasi negara yang memecah masyarakat dan membungkam kritik
<i>Diagnoses</i> (Memperkirakan Masalah)	<i>Causes</i> (Penyebab) Penyebabnya karena pola komunikasi yang menyerang pihak yang mengkritik
<i>Make Moral Judgment</i> (Membuat Keputusan Moral)	Jurnalis cenderung membela kritik terhadap pemerintah
<i>Treatment Recommendationa</i> (Penyelesaian Masalah)	Membuka ruang diskusi, jangan memecah masyarakat, evaluasi MBG, dan arahkan kebijakan untuk kebutuhan

Sumber: Olahan Peneliti

Berdasarkan hasil dari analisis tabel diatas, dapat melihat:

1. ***Define Problem***

Pada elemen ini, jurnalis membingkai masalah sebagai respon pemerintah pusat yang cenderung memecah belah masyarakat dalam menanggapi demonstrasi pelajar Papua. Masalah yang disorot bukan hanya pada program Makan Bergizi Gratis, tetapi pada narasi kekuasaan yang mengkriminalisasikan kritik, contohnya pada “Pernyataan seperti ini menciptakan polarisasi. Siapa yang mendukung dianggap membela rakyat, sementara yang mengkritik dituduh menghalangi hak rakyat. Ini pola lama yang pernah digunakan di era Orde Baru untuk membungkam oposisi.”

2. ***Diagnoses Causes***

Penyebab masalah dalam elemen ini, ditunjukkan sebagaipemerintah yang antikritik dan cenderung membungkam oposisi, seperti yang ditampilkan pada kutipan dan struktur narasi. Media menyoroti bahwa masalah ada pada cara komunikasi politik, bukan programnya saja.

3. ***Make Moral Judgment***

Jurnalis memberikan ruang yang besar untuk narasi dari Azril yang berisikan kritik moral terhadap praktik pemerintah, dan juga memasukkan nilai-nilai demokrasi, hak, dan partisipasi publik. Media tidak memberikan pembelaan diri dari pihak pemerintah, sehingga *framing* moral condong membela pihak yang mengkritik pemerintah.

4. *Treatment Recommendation*

Pada elemen ini, ada rekomendasi yang muncul yaitu membuka ruang diskusi, jangan memecah masyarakat, evaluasi Makan Bergizi Gratis, dan arahkan kebijakan dengan kebutuhan seperti Pendidikan. “Pemerintah harus membuktikan komitmennya terhadap demokrasi dengan membuka ruang diskusi, bukan membungkam kritik.”

c. Analisis berita 3

Judul : Unjuk Rasa Tolak Makan Bergizi Gratis Pelajar di Nabire Diangkut ke Mapolres.

Sumber : Jubi Papua

Tanggal : 17 Februari 2025

Ringkasan : Puluhan pelajar SMA di Nabire menggelar demonstrasi menolak Makan Bergizi Gratis karena khawatir akan kualitas makanan dan meminta pendidikan gratis. Namun, mereka diangkut polisi ke markas dan diarahkan secara paksa. Kapolres menyebut aksi ini mirip pola gerakan KNPB dan mengaitkan penggunaan simbol dalam demo dengan politik. Sementara itu, Kadinas Pendidikan mengapresiasi langkah cepat polisi dan menyatakan akan meningkatkan sosialisasi kepada pelajar.

Tabel 4.16. Analisis Berita 3 Jubi Papua

<i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah)		Aksi protes pelajar yang menolak MBG dan langsung direspon oleh aparat dengan pengamanan
<i>Diagnoses</i> (Memperkirakan Masalah)	<i>Causes</i> (Penyebab Masalah)	Diambil dari kutipan kapolres yang menyatakan aksi protes muncul karena provokasi pihak luar dan kesalahan penyalur aspiransi
<i>Make Moral Judgment</i> (Membuat Keputusan Moral)		Berdasarkan kutipan Dinas pendidikan, aksi pelajar dinilai negatif, pelajar diingatkan untuk fokus pada pembelajaran
<i>Treatment Recommendationa</i> (Penyelesaian Masalah)		Pengarahan, sosialisasi, dan pembinaan oleh sekolah dan aparat

Sumber: Olahan Peneliti

Berdasarkan hasil dari analisis tabel diatas, dapat melihat:

1. *Define Problem*

Pada elemen ini, jurnalis mendefinisikan masalah secara jelas di bagian pembuka berita: aksi unjuk rasa pelajar menolak program Makan Bergizi

Gratis di Nabire yang kemudian diangkut aparat ke Polres. Menekankan pada penanganan aparat terkait aksi demo lebih kuat disbanding alasan kenapa terjadinya demo. “Namun di tengah perjalanan mereka diangkut polisi dengan truk Dalmas ke Markas Polisi Resor Nabire.” Jadi, jurnalis mengangkat masalah utamanya adalah aksi protes yang dianggap perlu diamankan oleh aparat.

2. *Diagnoses Causes*

Pada elemen ini, jurnalis memberikan penyebab masalah dengan dua sudut yang berbeda. Menurut pelajar, mereka menolak karena adanya ketakutan terjadi keracunana apabila mereka ikut program Makan Bergizi Gratis dan tidak setuju Makan Bergizi Gratis lebih diutamakan daripada pendidikan gratis. Sedangkan menurut aparat, aksi ini dilihat karena adanya provokasi dari KNBP dan cara penyaluran aspirasi yang keliru. Tetapi jurnalis lebih menonjolkan dengan kutipan aparat, “Kapolres menyebutkan pola-pola yang digunakan para siswa mengarah ke Komite Nasional Papua Barat (KNPB).” dan “Terkait aspirasi menolak MBG, menurut Kapolres bisa diselesaikan di sekolah masing-masing.” Hal ini membingkai pendemo yang dilakukan pelajar bukan murni dari aspirasi siswa tersebut, melainkan adanya pengaruh dari pihak eksternal.

3. *Make Moral Judgment*

Dalam elemen ini, jurnalis tidak secara langsung atau terang-terangan dalam menyampaikan penilaian moralnya. Tetapi melalui berita yang ditutup dengan kutipan dari Dinas Pendidikan “Mereka [siswa] telah kembali ke sekolah dan menyadari bahwa tugas utama mereka adalah belajar, bukan berdemo.” Selain itu, pelajar yang ikut berdemo digambarkan terlalu mudah terprovokasi dan perlu diarahkan agar tidak terlibat hal negatif.

4. *Treatment Recommendation*

Pada elemen ini, jurnalis menyantumkan solusi yang diambil dari narasi Kadinas dan aparat bahwa sosialisasi harus ditingkatkan, sekolah wajib memberikan pemahaman, siswa perlu diarahkan kembali ke fungsi utamanya sebagai pelajar. Tidak dimasukkan solusi dari narasi pelajar. “Kami akan mengimbau seluruh kepala sekolah dan guru untuk terus

memberikan pemahaman kepada siswa agar mereka tidak terjerumus ke dalam hal-hal negatif, tetapi fokus kepada pendidikan.”

d. Analisis berita 4

- Judul : Aparat Keamanan Blokade Demonstrasi Solidaritas Pelajar West Papupa Menolak MBG.
- Sumber : Jubi Papua
- Tanggal : 17 Februari 2025
- Ringkasan : Puluhan pelajar di Jayapura melakukan aksi damai menolak Makan Bergizi Gratis dan menuntut pendidikan gratis. Mereka menyatakan makanan bukan kebutuhan mendesak dan Papua tidak kekurangan pangan. Aksi mereka dibatasi oleh blokade aparat keamanan, meski izin demo tidak dikeluarkan. Pelajar tetap diberi ruang terbatas untuk menyampaikan aspirasi.

Tabel 4.17. Analisis Berita 4 Jubi Papua

<i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah)	Penolakan MBG dan tuntutan Pendidikan gratis
<i>Diagnoses</i> (Memperkirakan Masalah)	<i>Causes</i> (Penyebab)
<i>Make Moral Judgment</i> (Membuat Keputusan Moral)	Diangkat melalui kutipan pelajar yang menyatakan penolakan MBG karena Papua tidak kekurangan pangan, permasalahannya karena biaya Pendidikan tinggi
<i>Treatment Recommendationa</i> (Penyelesaian Masalah)	Melalui spanduk dan orasi yang menyatakan MBG dipersepsikan sebagai program pemaksaan dan salah sasaran, dan juga kritik terhadap kehadiran aparat
	Solusi yang diberikan lewat kutipan yang menyatakan <i>stop</i> MBG, alihkan anggaran ke Pendidikan gratis

Sumber: Olahan Peneliti

Berdasarkan hasil dari analisis tabel diatas, dapat melihat:

1. Define Problem

Pada elemen ini, jurnalis membuka berita langsung menyajikan masalah utamanya yaitu aksi demo pelajar yang menolak program Makan Bergizi Gratis dan menuntut pendidikan gratis. “Puluhan pelajar se-Kota Jayapura menolak Makanan Bergizi Gratis atau MBG dan menuntut pendidikan gratis...” pada bagian ini disusun oleh jurnalis sendiri di bagian narasi.

2. ***Diagnoses Causes***

Pada elemen ini, penyebab masalah diangkat lewat kutipan dari pelajar, yang berisikan penolakan Makan Bergizi Gratis muncul karena Papua tidak kekurangan pangan, sedangkan masalah utama di Papua adalah biaya sekolah yang mahal. “Tanpa makanan gratis kita tidak kekurangan makanan, makanan di Papua itu banyak. Banyak teman-teman tidak sekolah, ada yang putus sekolah bukan karena tidak makan tapi karena tidak mampu bayar uang sekolah,”

3. ***Make Moral Judgment***

Pada elemen ini, jurnalis tidak secara langsung menyatakan penilaian moralnya. Penilaian moralnya disampaikan melalui spanduk dan narasi yang dikutip dan diuraikan oleh jurnalis. Kritik diarahkan kepada pemerintah dan aparat: Makan Bergizi Gratis adalah program pemaksaan, kehadiran aparat adalah militerisme di dunia Pendidikan. Spanduk: “Hentikan Militerisme di Dunia Pendidikan”, “Hentikan pemaksaan MBG terhadap siswa.”

4. ***Treatment Recommendation***

Pada elemen ini, solusi muncul dari narasi atau kutipan pelajar yang meminta pemerintah menghentikan program Makan Bergizi Gratis dan alihkan menjadi Pendidikan gratis di seluruh Papua. “Kami menuntut pemerintah agar menggantikan MBG dengan pendidikan gratis bagi siswa-siswi di 6 Provinsi di Tanah Papua...”

e. **Analisis berita 5**

Judul : Agendakan Demonstrasi Tolak MBG, Massa Aksi SPWP Belum Terlihat.

Sumber : Jubi Papua

Tanggal : 17 Februari 2025

Ringkasan : Walau tidak ada demonstrasi berlangsung pada pagi hari, aparat kepolisian dan Brimob telah siaga penuh di sejumlah titik di Jayapura. Kepala sekolah sebelumnya menginstruksikan siswa untuk tidak ikut demo dan

menutup akses sekolah. Kepolisian menyatakan tetap disiagakan untukantisipasi demo dan putusan MK.

Tabel 4.18. Analisis Berita 5 Jubi Papua

<i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah)		Rencana demo penolakan MBG yang batal atau tidak terlihat, dengan kehadiran aparat
<i>Diagnoses</i> (Memperkirakan Masalah)	<i>Causes</i> (Penyebab Masalah)	Kutipan dari Kapolsek yang menyatakan penyebab ditekankan kepala sekolah tidak setuju demo
<i>Make Moral Judgment</i> (Membuat Keputusan Moral)		Berdasarkan kutipan Kapolsek yaitu demo siswa dianggap tidak pantas
<i>Treatment Recommendationa</i> (Penyelesaian Masalah)		Solusi diambil dari kutipan Kapolsek dengan mencegah demo dengan pengamanan dan penutupan akses sekolah

Sumber: Olahan Peneliti

Berdasarkan hasil dari analisis tabel diatas, dapat melihat:

1. *Define Problem*

Jurnalis mendefinisikan masalah pada paragraph pembuka: rencana demo pelajar menolak Makan Bergizi Gratis yang tidak tampak di lapangan, dan bagaimana aparat keamanan justru mendominasi tempat. “Massa aksi Solidaritas Pelajar West Papua belum terlihat di berbagai titik kumpul... Padahal mereka mengagendakan demonstrasi untuk menolak program Makan Bergizi Gratis atau MBG.”

2. *Diagnoses Causes*

Pada elemen ini, penyebab demo batal diambil dari penjelasan Kapolsek yang menyatakan bahwa kepala sekolah juga menolak demo, sekolah mengunci pagar, dan siswa dilarabg untuk mengikuti aksi demo. Pada bagian ini lebih dominan kutipan dari aparat dibandingkan pendapat dari pelajar. “Mereka tidak setuju ada demo itu. Makanya masing-masing sekolah mengunci pintu pagarnya, dan siswanya dilarang untuk demo.”

3. *Make Moral Judgment*

Pada elemen ini, penilaian moral diambil dari kutipan narasumber yang dicantumkan oleh jurnalis tanpa ada penambahan apapun. Demo pelajar ini dianggap tidak diinginkan dan perlu dicegah, sehingga tindakan pengaman oleh aparat dianggap wajar. “Kemarin kami sudah melakukan zoom dengan kepala sekolah di Jayapura terkait demo hari ini. Mereka tidak setuju ada demo itu.”

4. *Treatment Recommendation*

Pada elemen ini, jurnalis juga mengambil dari kutipan narasumber yang memberikan solusi untuk sekolah akan menutup gerbangnya, aparat disiagakan di titik kumpul demo, dan antisipasi ganda. "...masing-masing sekolah [akan] mengunci pintu pagarnya, dan siswanya dilarang untuk demo." Jurnalis mengambil dari kutipan narasumber tanpa ada penambahan dari opininya.

f. Analisis berita 6

Judul : Amnesty International Indonesia: Hentikan Intimidasi Pelajar yang Demo Tolak MBG.

Sumber : Jubi Papua

Tanggal : 19 Februari 2025

Ringkasan : Pernyataan Amnesty International Indonesia yang mengecam tindakan aparat kepolisian dan ASN di Tanah Papua yang dianggap melakukan pelanggaran HAM dalam merespons aksi protes pelajar yang menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG). Amnesty mengkritik penangkapan, penggunaan gas air mata, tembakan peringatan, hingga kekerasan fisik terhadap pelajar di Nabire, Yalimo, Jayapura, dan Wamena. Amnesty mendesak agar polisi dan ASN menghentikan intimidasi, memproses hukum pelaku kekerasan, dan memastikan hak anak untuk berekspresi secara damai.

Tabel 4.19. Analisis Berita 6 Jubi Papua

<i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah)		Penindakan aparat pada pelajar adalah pelanggaran HAM
<i>Diagnoses</i> (Memperkirakan Masalah)	<i>Causes</i> Penyebab	Penyebab digambarkan melalui kutipan narasumber, sikap antikritik dan intimidasi aparat dinilai sebagai taktik membungkam suara terkait MBG
<i>Make Moral Judgment</i> (Membuat Keputusan Moral)		Melalui kutipan narasumber: tindakan aparat dan ASN adalah pelanggaran hukum dan moral, melanggar HAM dan perlindungan anak
<i>Treatment Recommendationa</i> (Penyelesaian Masalah)		Berdasarkan narasumber: investigasi aparat, proses hukum ASN, hentikan intimidasi, dan lindungi hak anak

Sumber: Olahan Peneliti

Berdasarkan hasil dari analisis tabel diatas, dapat melihat:

1. ***Define Problem***

Pada elemen ini, masalah digambarkan pada Amnesty yang menilai penangkapan dan kekerasan aparat kepada pelajar yang menolak Makan Bergizi Gratis di Papua adalah pelanggaran HAM. "Amnesty International Indonesia menyatakan pelanggaran dan penangkapan para pelajar yang berunjuk rasa untuk menolak program Makan Bergizi Gratis di Tanah Papua merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia atau HAM." Jurnalis memfokuskan beritanya dari sudut pandang Amnesty bukan penjelasan dari aparat.

2. ***Diagnoses Causes***

Pada elemen ini, penyebab masalah dicantumkan oleh jurnalis dari kutipan Amnesty. Penyebab digambarkan oleh Amnesty sebagai budaya anti-kritik dan taktik pemerintah untuk meredam suara kritis terkait program Makan Bergizi Gratis. "Sikap anti-kritik yang dinormalkan lewat penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh aparat dan ASN Papua harus segera dihentikan."

3. ***Make Moral Judgment***

Pada elemen ini, jurnalis mengambil kutipan dari Amnesty untuk penilaian moralnya. Amnesty memberikan penilaian moral yang cukup tegas, yaitu tindakan aparat adalah pelanggaran HAM, ASN yang menginjak pelajar adalah pelanggaran UU perlindungan anak, dan negara salah karena menindas suara pelajar. "Kepolisian juga harus memproses hukum ASN yang tertangkap kamera menginjak seorang siswa..."

4. ***Treatment Recommendation***

Pada elemen ini, jurnalis memfokuskan rekomendasi atau solusi pada Amnesty sebagai penutup dari berita. Amnesty memberikan rekomendasi: investigasi anggota polisi, proses hukum ASN yang melakukan kekerasan terhadap pelajar, dan negara harus melindungi anak. "Polisi harus melakukan investigasi mendalam terhadap anggotanya. Negara harus terbuka menerima kritik."

g. Analisis berita 7

- Judul : Mengapa Pelajar Papua Menolak MBG?
Sumber : Jubi Papua
Tanggal : 24 Februari 2025
Ringkasan : Berita ini mengulas secara mendalam latar belakang penolakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua. Artikel menjelaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis lahir dari kebijakan *top-down* pemerintah pusat yang bersifat sentralistis, mengabaikan prinsip otonomi daerah Papua dan aspirasi masyarakat lokal. Penolakan pelajar Papua dianggap logis karena akar masalah pendidikan di Papua lebih kompleks: infrastruktur, guru, biaya sekolah, dan kesenjangan kualitas. Artikel menekankan perlunya pembaruan kebijakan dengan pendekatan inklusif, memperluas partisipasi publik, dan menyinergikan Makan Bergizi Gratis dengan peningkatan kualitas pendidikan.

Tabel 4.20. Analisis Berita 7 Jubi Papua

<i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah)	MBG gagal diterima pelajar Papua karena kebijakan sentralis
<i>Diagnoses</i> (Memperkirakan Masalah)	<i>Causes</i> Penyebab Kebijakan <i>top-down</i> , minimnya partisipasi publik, dan pengingkaran Otsus
<i>Make Moral Judgment</i> (Membuat Keputusan Moral)	Kebijakan pemerintah dinilai keliru dan tidak adil bagi Papua
<i>Treatment Recommendationa</i> (Penyelesaian Masalah)	Solusi yang diberikan: MBG diubah, tingkatkan mutu Pendidikan

Sumber: Olahan Peneliti

Berdasarkan hasil dari analisis tabel diatas, dapat melihat:

1. Define Problem

Pada elemen ini, jurnalis mendefinisikan masalah pada paragraf pembukanya. Menjelaskan bahwa Makan Bergizi Gratis gagal dalam menarik simpati para pelajar di Papua karena kebijakan yang dibuat secara sentralistis, tanpa melihat kebutuhan Pendidikan di Papua. “Program

prestisius Presiden Prabowo Subianto yaitu MBG gagal mendapat simpati dari para pelajar di tanah Papua.”

2. ***Diagnoses Causes***

Pada elemen ini, jurnalis menganalisis penyebab masalah penolakan Makan Bergizi Gratis karena kebijakan lahir dari janji kampanye, mengabaikan otonomi daerah dan UU Otsus, dan juga minimnya ruang diskusi publik dan aspirasi lokal. “Penolakan MBG hendak menunjukkan, bahwa pemerintah pusat gagal mengidentifikasi akar persoalan pendidikan di Papua.”

3. ***Make Moral Judgment***

Pada elemen ini, jurnalis secara tegas mengatakn penilaian moral kebijakan pemerintah tidak inklusif, tidak kontekstual, dan melanggar prinsip keadilan Otsus Papua. Manajemen sentralistis dianggap kebijakan yang tidak relevan. “Praktik manajemen pemerintahan dengan gaya sentralistis dan top down hanya melahirkan kebijakan yang tidak inklusif, dan tidak relevan...”

4. ***Treatment Recommendation***

Pada elemen ini, jurnalis menekankan bahwa Makan Bergizi Gratis perlu diubah dan dikombinasikan dengan program yang dapat meningkatkan kualitas Pendidikan, perbaikan fasilitas, peningkatan jumlah dan mutu guru, dan membuka ruang partisipasi publik melalui diskusi dengan semua pihak terkait di Papua. “Perubahan kebijakan MBG merupakan hal mendesak... dikombinasikan dengan berbagai program peningkatan kualitas pendidikan di Papua secara menyeluruh...”

h. Analisis berita 8

Judul : LBH Papua Protes Dugaan Polisi Pukul Pelajar Saat Aksi Tolak Makan Gratis

Sumber : Jubi Papua

Tanggal : 18 Februari 2025

Ringkasan : Berita ini melaporkan dugaan tindakan kekerasan oleh polisi terhadap peserta aksi pelajar yang menolak program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Jayapura. LBH

Papua mengecam tindakan tersebut karena dinilai melanggar hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat. Dua pelajar dilaporkan mengalami luka akibat pemukulan. Polisi membantah istilah penangkapan dengan menyebut mereka hanya “diamankan” karena aksi dianggap tidak berizin. Kepala Polsek Heram belum memberikan klarifikasi resmi saat berita diterbitkan.

Tabel 4.21. Analisis Berita 8 Juli Papua

<i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah)		Adanya dugaan penganiayaan oleh polisi terhadap pelajar yang menolak MBG
<i>Diagnoses</i> (Memperkirakan Masalah)	<i>Causes</i> (Penyebab)	Penyebab diambil dari kutipan LBH: tindakan kekerasan aparat saat membubarkan aksi
<i>Make Moral Judgment</i> (Membuat Keputusan Moral)		Penilaian moral dari kutipan LBH: tindakan polisi melanggar konstitusi dan hak asasi
<i>Treatment Recommendationa</i> (Penyelesaian Masalah)		Solusi diambil dengan kutipan LBH: tindakan aparat harus dihentikan, kebebasan berpendapat harus dijamin

Sumber: Olahan Peneliti

Berdasarkan hasil dari analisis tabel diatas, dapat melihat:

1. ***Define Problem***

Pada elemen ini, jurnalis membuka berita dengan mengaskan masalah utamanya yaitu, dugaan penganiayaan oleh polisi kepada pelajar yang menolak Makan Bergizi Gratis. “Polisi diduga menganiaya peserta aksi pelajar tolak Program Makanan Bergizi Gratis di Kota Jayapura...”

2. ***Diagnoses Causes***

Pada elemen ini, jurnalis menguraikan penyebab masalah melalui keterangan dari LBH Papua, yang dimana mengatakan tindakan pembubaran paksa oleh polisi disertai kekerasan. “Kami mendapati dua pelajar diduga dipukul polisi. Mereka mengalami luka dan benjol pada kening.”

3. ***Make Moral Judgment***

Pada elemen ini, jurnalis mencantumkan melalui kutipan LBH Papua yang menegaskan tindakan polisi melanggar UUD 1945 dan membatasi hak berpendapat. “Kebebasan menyampaikan pendapat itu dijamin Undang Undang Dasar 1945. Jadi, apa pun alasan... tidak bisa dibatasi.”

4. *Treatment Recommendation*

Pada elemen ini, jurnalis juga tidak mengatakan secara langsung. Tetapi melalui narasi berita yang ditulis bahwa sikap LBH Papua menuntut penghentian intimidasi dan kekerasan, serta penegakan kebebasan berpendapat. “LBH Papua memprotes dugaan penganiayaan tersebut.”

i. Analisis berita 9

Judul : IPMY di NTT Dukung Kasi Aliansi Pelajar Se-Yahukimo Tolak MBG

Sumber : Jubi Papua

Tanggal : 05 Februari 2025

Ringkasan : Berita ini memuat pernyataan Ikatan Pelajar Mahasiswa Yahukimo (IPMY) di NTT yang mendukung penolakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan meminta pemerintah kabupaten Yahukimo mengalihkan anggaran Makan Bergizi Gratis untuk peningkatan kualitas pendidikan. IPMY menegaskan bahwa di Yahukimo, kebutuhan sarana-prasarana pendidikan jauh lebih mendesak daripada makan gratis, karena makanan alami sudah tersedia bagi masyarakat. Mereka mendesak Pemkab Yahukimo memprioritaskan laboratorium, perpustakaan, buku pelajaran, serta ketersediaan guru, daripada melanjutkan Makan Bergizi Gratis.

Tabel 4.22. Analisis Berita 9 Jubi Papua

<i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah)		MBG dianggap bukan kebutuhan mendesak, yang menjadikan fokus Papua adalah sarana dan kualitas pendidikan
<i>Diagnoses</i> (Memperkirakan Masalah)	<i>Causes</i> (Penyebab)	Dikutip dari narasumber: kebijakan MBG tidak relevan dengan kondisi di Yahukimo yang membutuhkan fasilitas pembelajaran
<i>Make Moral Judgment</i> (Membuat Keputusan Moral)		Berdasarkan kutipan narasumber: MBG dianggap pemborosan, karena masyarakat Papua tidak kekurangan makan
<i>Treatment Recommendation</i> (Penyelesaian Masalah)		Solusi yang diberikan berdasarkan narasumber: alihkan anggaran untuk pembiayaan pendidikan

Sumber: Olahan Peneliti

Berdasarkan hasil dari analisis tabel diatas, dapat melihat:

1. ***Define Problem***

Pada elemen ini, jurnalis mendefinisikan masalah dari pernyataan IPMY: program Makan Bergizi Gratis bukan prioritas di Yahukimo, karena Pendidikan masih memiliki banyak masalah mendasar. “IPMY di NTT mendukung aksi... menolak program MBG dan meminta alokasi anggaran... untuk peningkatan kualitas pendidikan.”

2. ***Diagnoses Causes***

Pada elemen ini, jurnalis mencantumkan penyebab penolakan berdasarkan ungkapan dari IPMY yang menyatakan kebutuhan mendesak Yahukimo adalah sarana prasarana belajar, bukan makan gratis. Makanan sudah ada secara alami dari kebun-kebun warga. “Dalam dunia pendidikan makan gratis itu bukan hal urgen... yang lebih dibutuhkan justru pendidikan gratis.”

3. ***Make Moral Judgment***

Pada elemen ini, jurnalis mengambil kutipan dari IPMY yang secara moral menilai Makan Bergizi Gratis tidak tepat dan membuang anggaran. Mereka menekankan bahwa siswa Papua dan masyarakatnya tidak kekurangan makanan. “Jika orang Papua atau lebih khusus siswa lapar pasti makan di rumah karena makanan alami yang lebih bergizi telah tersedia.”

4. ***Treatment Recommendation***

Pada elemen ini, jurnalis juga mengutip solusi dari narasi narasumber. Rekomendasi secara tegas dengan mengatakan anggaran Makan Bergizi Gratis harus dialihkan untuk mendanai Pendidikan gratis, fasilitas belajar, tenaga didik, dan buku pelajaran. “Uang yang telah dialokasikan untuk makan siang gratis tersebut, segera [alihkan untuk] melengkapi dan membiayai pendidikan gratis di Kabupaten Yahukimo.”

j. **Analisis berita 10**

Judul : Aliansi Pelajar Sw-Yahukimo Gelar Aksi Tolak Program Makan Gratis
Sumber : Jubi Papua
Tanggal : 03 Februari 2025

Ringkasan : Aliansi Pelajar Se-Yahukimo yang menggelar demo damai dengan tema “Sekolah bukan warung tetapi sekolah tempat belajar”. Aksi ini dihadiri pelajar dari jenjang SD hingga SMK, guru, kepala suku, tokoh agama, orang tua, pemuda, dan perwakilan pemerintah. Seluruh elemen yang hadir secara tegas menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG), menilai program ini tidak diperlukan karena siswa sudah memiliki keluarga yang menyiapkan makanan. Mereka menuntut pendidikan gratis dan berkualitas. Perwakilan pemerintah berjanji akan menyampaikan aspirasi penolakan Makan Bergizi Gratis ke bupati. Jika tuntutan diabaikan, pelajar mengancam akan melakukan mogok pendidikan secara massal.

Tabel 4.23. Analisis Berita 10 Jubi Papua

<i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah)	Masalah didefinisikan sebagai sekolah disalah fungsikan sebagai tempat makan gratis, sementara fungsinya untuk melakukan proses belajar
<i>Diagnoses</i> (Memperkirakan Masalah)	<i>Causes</i> (Penyebab)
<i>Make Moral Judgment</i> (Membuat Keputusan Moral)	Penyebabnya karena program MBG diturunkan <i>top-down</i> tanpa koordinasi dengan pemerintah daerah dan kebijakan dianggap tidak relevan secara lokal
<i>Treatment Recommendationa</i> (Penyelesaian Masalah)	Diambil dari kutipan narasumber: program MBG melecehkan martabat keluarga seolah siswa tidak mempunyai orang tua. Program dinilai tidak bernilai bagi kearifan lokal
	Rekomendasi diberikan dari kutipan narasumber: hentikan MBG, jika tidak maka aksi mogok pendidikan akan dilakukan

Sumber: Olahan Peneliti

Berdasarkan hasil dari analisis tabel diatas, dapat melihat:

1. *Define Problem*

Pada elemen ini, jurnalis mendefinisikan masalahnya ditekankan dengan tema dari aksi yaitu sekolah bukan tempat makan, melainkan tempat belajar. Pada hal ini, pelajar dan masyarakat memandang Makan Bergizi Gratis sebagai makna yang berbeda dengan fungsi Pendidikan. “Sekolah bukan warung tetapi sekolah tempat belajar.”

2. *Diagnoses Causes*

Pada elemen ini, jurnalis melalui kutipan dari narasumber yang dipaparkan oleh guru yang menyatakan Makan Bergizi Gratis adalah program langsung dari pusat, tanpa melibatkan pemerintah daerah, sehingga implementasi di

lapangan tidak sesuai kebutuhan di Papua. “Program ini langsung dari pemerintah pusat diturunkan ke sekolah dan tidak melalui pemerintah daerah.”

3. *Make Moral Judgment*

Pada elemen ini, jurnalis mengambil kutipan dari narasumber yaitu kepala suku dan tokoh masyarakat yang menilai Makan Bergizi Gratis adalah program yang merendahkan martabat keluarga, seolah anak Papua tidak mempunyai orang tua. “Anak-anak kami punya bapa dan mama sehingga jangan bikin kayak tidak punya orang tua.”

4. *Treatment Recommendation*

pada elemen terakhir ini, jurnalis juga mengambil solusi dari kutipan narasumber yaitu pemerintah atau penanggung jawab aksi. Rekomendasi jelas mengatakan bahwa pemerintah setempat akan menindaklanjuti aspirasi untuk menghentikan Makan Bergizi Gratis. Jika tuntutan diabaikan oleh pemerintah, pelajar dan masyarakat siap melakukan mogok Pendidikan massal. “Jika aktivitas pembagian makanan gratis masih dilakukan maka kami Aliansi Pelajar Se-Yahukimo akan konsolidasi besar-besaran untuk mogok pendidikan di seluruh Yahukimo.”

k. Analisis berita 11

Judul : Aliansi Pelajar Se Kabupaten Paniai Tolak Program Makan Bergizi Gratis
Sumber : Jubi Papua
Tanggal : 24 Februari 2025
Ringkasan : Aliansi Pelajar Se-Kabupaten Paniai yang melakukan longmarch sejauh 4 kilometer ke Kantor Bupati untuk menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan menuntut pendidikan gratis. Para pelajar menegaskan bahwa orang tua mereka mampu menyediakan makanan bergizi dari hasil alam, sehingga program makan gratis dianggap tidak perlu. Mereka meminta anggaran dialihkan untuk memperbaiki sarana-prasarana dan pendidikan

gratis. Beberapa guru mendukung aksi dengan mendampingi siswa, sedangkan sebagian guru lain mempertanyakan efektivitas aksi. Aparat kepolisian mengawal jalannya aksi damai yang aspirasi akhirnya diterima pemerintah daerah untuk diteruskan ke Bupati Paniai.

Tabel 4.24. Analisis Berita 11 Jubi Papua

<i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah)	Program MBG yang tidak relevan dan siswa yang membutuhkan pendidikan gratis
<i>Diagnoses</i> (Memperkirakan Masalah)	<i>Causes</i> (Penyebab) Berdasarkan kutipan narasumber, penyebabnya karena makanan di Papua sudah cukup dan biaya pendidikan yang masih berat
<i>Make Moral Judgment</i> (Membuat Keputusan Moral)	Berdasarkan kutipan narasumber, penilaian moralnya keresahan siswa adalah hal yang sah dan didukung oleh guru
<i>Treatment Recommendationa</i> (Penyelesaian Masalah)	Menurut kutipan koordinator aksi, solusi yang dibeirkan adalah <i>stop</i> MBG dan mulai ofkus pada pendidikan gratis serta fasilitasnya

Sumber: Olahan Peneliti

Berdasarkan hasil dari analisis tabel diatas, dapat melihat:

1. ***Define Problem***

Pada elemen ini, jurnalis mendefinisikan masalah pada paragraph pembuka yang membahas terkait pelajar menolak Makan Bergizi Gratis karena dianggap tidak mendesak, sementara di Papua mempunyai kebutuhan yang lebih penting yaitu Pendidikan gratis. “Tujuan diselenggarakan aksi itu untuk menolak program nasional makan bergizi gratis...”

2. ***Diagnoses Causes***

Pada elemen ini, jurnalis mengambil penyebab masalah berdasarkan dari kutipan narasumber yaitu coordinator aksi yang mengatakan bahwa makan bergizi gratis sudah tersedia dirumah masing-masing anak dan alam yang ada di Papua, dan lagi merek menegaskan bahwa yang sulit adalah biaya sekolah. “Makanan bergizi itu selalu disiapkan oleh orang tua kami... Yang kami susah adalah biaya pendidikan.”

3. ***Make Moral Judgment***

Pada elemen ini, jurnalis mengutip penilaian moral berdasarkan narasi dari kepala sekolah yang tutur mendukung kasi dari siswanya. Menurutnya, keresahan siswa itu adalah hal wajar dan perlu didengar. Guru sebagai

pendamping juga turut hadir mendampingi siswa agar tetap aman. “Kami memilih untuk memahami dan menghargai kegelisahan orang tua dan anak-anak siswa...”

4. *Treatment Recommendation*

Pada elemen ini, jurnalis mengambil kutipan dari narasumber yang jelas memberikan solusi untuk stop Makan Bergizi Gratis dan mengalihkannya untuk dana ke Pendidikan dan perbaikan fasilitasnya. Pemerintah daerah juga berjanji akan meneruskan aspirasi ini ke Bupati. “Penolakan ini dilakukan agar ke depan tidak ada program makanan bergizi gratis itu lagi. Melainkan pendidikan digratiskan, sarana prasarana dilengkapi.”

l. Analisis berita 12

Judul : Ribuan Pelajar di Deiyai Demo Tolak Makan Bergizi Gratis

Sumber : Jubi Papua

Tanggal : 26 Februari 2025

Ringkasan : Ribuan pelajar dari berbagai SMP, SMA, dan SMK di Kabupaten Deiyai, Papua Tengah, menggelar aksi unjuk rasa menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan menuntut pemerintah menggantinya dengan program pendidikan gratis yang memadai. Mereka menilai Makan Bergizi Gratis tidak relevan dengan kebutuhan nyata karena sarana-prasarana pendidikan masih kurang, guru masih minim, dan dana Otonomi Khusus justru dipangkas untuk mendanai Makan Bergizi Gratis. Para pelajar juga meminta beasiswa untuk calon guru dan pembangunan perpustakaan di setiap sekolah. Aksi ini direspons Ketua DPRD dan Penjabat Sekda Deiyai yang menerima aspirasi, namun menegaskan bahwa Makan Bergizi Gratis adalah program pusat yang tidak bisa dihapus oleh pemerintah kabupaten.

Tabel 4.25. Analisis Berita 12 Jubi Papua

<i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah)	Program MBG tidaklah relevan bagi pelajar Papua dan siswa membutuhkan Pendidikan gratis
<i>Diagnoses Causes</i> (Memperkirakan Penyebab Masalah)	Berdasarkan narasumber penyebabnya karena MBG memotong anggaran Otsus dan fasilitas pendidikan belum terpenuhi
<i>Make Moral Judgment</i> (Membuat Keputusan Moral)	Berdasarkan narasumber penyebabnya karena MBG adalah program yang sia-sia dan tidak adil karena masyarakat Deiyai punya sumber pangan alami tapi tidak pendidikannya
<i>Treatment Recommendationa</i> (Penyelesaian Masalah)	Solusi diberikan lewat kutipan narasumber yang mengatakan <i>stop</i> MBG dan prioritaskan Pendidikan gratis

Sumber: Olahan Peneliti

Berdasarkan hasil dari analisis tabel diatas, dapat melihat:

1. ***Define Problem***

Pada elemen ini, jurnalis memulai beritan dengan mengungkapkan masalah di paragraf utamanya, yang mengatakan ribuan pelajar di Deiyai turun ke jalan untuk menolak program Makan Bergizi Gratis dan menuntut pendidikan gratis. Jurnalis secara langsung merangkai fakta dan tuntutan pelajar di kalimat pembukanya. “Ribuan pelajar di Kabupaten Deiyai... menolak program Makan Bergizi Gratis atau MBG, dan meminta pemerintah membuat program pendidikan gratis.”

2. ***Diagnoses Causes***

Pada elemen ini, jurnalis menjelaskan penyebab penolakan Makan Bergizi Gratis melalui kutipan koordinator aksi, ia mengatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis tidak berdampak pada kemajuan Pendidikan di Papua karena beberapa hal. Misalnya dana Otsus di pangkas, fasilitas Pendidikan minim, kekurangan pengajar, dan Makan Bergizi Gratis tidak meningkat mutu belajar siswa. “Program Makan Bergizi Gratis tidak menguntungkan pelajar di Tanah Papua, dan tidak akan memajukan pembangunan sektor pendidikan.”

3. ***Make Moral Judgment***

Pada elemen ini, penilaian moral disampaikan oleh narasumber yaitu coordinator aksi yang menegaskan bahwa rakyat Deiyai sudah diberikan makan oleh alam dan tidak perlu bergantung dengan program pemerintah. Mendandakan program Makan Bergizi Gratis dianggap memboroskan anggaran yang lebih baik untuk Pendidikan gratis. “Tuhan sudah

memberikan alam yang kaya makanan... Saya meminta pemerintah pusat bikin program pendidikan gratis daripada Makan Bergizi Gratis.”

4. *Treatment Recommendation*

Pada elemen ini, jurnalis memberikan rekomendasi atau solusi yang dikutip dari narasumber. Solusi yang diberikan juga sangat rinci dan realistis yang berasal dari siswa, coordinator aksi dan diterima oleh DPRD. Mereka memberikan solusi berupa stop Makan Bergizi Gratis, kembalikan anggaran Otsus untuk Pendidikan, sediakan beasiswa khusus Pendidikan guru, lengkapi fasilitas sekolah. “Kami pelajar se-Kabupaten Deiyai tidak membutuhkan Makan Bergizi Gratis. Yang kami butuhkan adalah pendidikan yang memadai dan gratis.”

m. Analisis berita 13

Judul : Pelajar Papua Desak Prabowo Berikan Pendidikan Gratis, Istana: Itu hak mereka
Sumber : Jubi Papua
Tanggal : 17 Februari 2025
Ringkasan : Aksi Solidaritas Pelajar West Papua (SPWP) di Kota Jayapura dan beberapa kabupaten lain yang mendesak Presiden Prabowo Subianto memberikan pendidikan gratis di Tanah Papua, menolak program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Para pelajar menilai banyak siswa putus sekolah karena biaya pendidikan tinggi, sementara Makan Bergizi Gratis hanya bermanfaat bagi siswa dari keluarga mampu. Mereka meminta anggaran Makan Bergizi Gratis dialihkan untuk mewujudkan sekolah gratis. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan menanggapi aksi ini dengan menegaskan bahwa penolakan Makan Bergizi Gratis tidak boleh menghalangi hak siswa lain untuk menerima makan bergizi gratis, serta mengajak semua pihak berdialog.

Tabel 4.26. Analisis Berita 13 Jubi Papua

<i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah)	MBG tidak menjawab masalah siswa putus sekolah di Papua
<i>Diagnoses Causes</i> (Memperkirakan Penyebab Masalah)	Penyebab masalah adalah kemiskinan orangtua, biaya pendidikan tinggi yang berdasarkan dari kutipan narasumber
<i>Make Moral Judgment</i> (Membuat Keputusan Moral)	Penilaian moral berdasarkan narasumber yang mengatakan MBG tidak adil, salah sasaran, dan hanya menguntungkan siswa mampu
<i>Treatment Recommendationa</i> (Penyelesaian Masalah)	Alihkan dana MBG untuk pendidikan gratis

Sumber: Olahan Peneliti

Berdasarkan hasil dari analisis tabel diatas, dapat melihat:

1. *Define Problem*

Pada elemen ini, jurnalis mendefinisikan masalah pada lead berita yang ditegaskan lagi dengan menambahkan kutipan dari pelajar. Fokus masalahnya adalah ketidaksesuaian Makan Bergizi Gratis dengan kebutuhan pelajar Papua. Banyak pelajar yang harus terpaksa putus sekolah karena biaya yang tinggi, sedangkan Makan Bergizi Gratis tidak mengatasi permasalahan Pendidikan tersebut. “Solidaritas Pelajar West Papua... mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan pendidikan gratis di Tanah Papua. Mereka menilai pendidikan gratis lebih mendesak dibandingkan program MBG...”

2. *Diagnoses Causes*

Pada elemen ini, jurnalis menguraikan penyebab melalui pernyataan dari pelajar SPWP, ia mengatakan bahwa masalah ekonomi keluarga menjadi penyebab utama banyak anak Papua berhenti sekolah. Program Makan Bergizi Gratis hanya berfokus untuk memberi makan, bukan membebaskan biaya Pendidikan. “Banyak teman kami putus sekolah karena orang tua tidak mampu.” “MBG hanya menguntungkan anak-anak orang kaya, sementara anak-anak petani tetap tidak bisa sekolah.”

3. *Make Moral Judgment*

Pada elemen ini, jurnalis menyampaikan penilaian moral melalui kutipan pelajar yang menilai Makan Bergizi Gratis tidak adil dan tidak tepat sasaran, dan hanya menjadi program yang menguntungkan siswa dari keluarga mampu. Diperkuat lagi dengan argument bahwa Pendidikan jauh lebih

penting dan membutuhkan biaya. “Makanan bisa didapatkan di mana saja, tapi pendidikan membutuhkan biaya. MBG hanya menguntungkan anak-anak orang kaya...”

4. *Treatment Recommendation*

Pada elemen ini, jurnalis memberikan rekomendasi atau solusi dari dua sisi. Yang pertama dari kutipan SPWP yang dimana tegas menuntut penghentian Makan Bergizi Gratis dan meminta anggaran dialihkan untuk Pendidikan gratis dan fasilitasnya. “Kami tidak butuh makanan gratis. Yang kami butuhkan adalah pendidikan gratis...” Sedangkan solusi yang dibeirkan oleh istana, menanggapi aksi dengan mengimbau agar aspirasi disampaikan secara damai, tidak menghalangi siswa lain dan membuka ruang diskusi. “Kalau ada orang yang bilang mereka gak perlu, mereka bisa sampaikan hal itu... Tapi kalau sampai berujung rasa untuk membatalkan dan menolak, itu menghalangi hak-hak saudara-saudara yang lain...” ini menunjukkan solusi yang kontras antara pelajar dan pemerintah.

4.3 Perbandingan Analisis Framing

Setelah dilakukan analisis terhadap dua media, yaitu Kompas.com sebagai media nasional dan Jubi Papua sebagai media lokal, perbandingan pola pemberitaan mengenai penolakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua dapat dilihat melalui perangkat *framing* yang dikembangkan oleh Robert N. Entman. Menurut Entman, *framing* memiliki peranan penting dalam memengaruhi cara pandang seseorang terhadap suatu isu atau peristiwa. Hal ini dilakukan melalui pemberian konteks, penonjolan elemen tertentu, pengabaian unsur lain, serta pengaitannya dengan kerangka pemikiran yang sudah ada dalam *audiens*. Dengan mekanisme tersebut, *framing* secara efektif mampu mengarahkan fokus perhatian publik dan memengaruhi cara mereka memahami serta menilai suatu informasi (Nurmalia, 2025).

Dengan memahami konsep *framing* dari Entman, masyarakat diharapkan mampu menjadi pembaca yang lebih kritis. Keempat elemen *framing*, yaitu *Define Problem*, *Diagnose Causes*, *Make Moral Judgment*, dan *Treatment*

Recommendation memungkinkan pembaca untuk menelaah bagaimana media menyoroiti masalah, menunjuk penyebab, menilai dari sisi moral, dan menawarkan solusi. Dalam konteks Makan Bergizi Gratis, aspek-aspek ini menjadi penting karena kebijakan pemerintah yang pada dasarnya bertujuan baik dapat diinterpretasikan berbeda di lapangan, terutama bila dihadapkan dengan realitas sosial, budaya, dan politik lokal Papua.

Perbedaan cara membingkai isu antara Kompas.com dan Jubi Papua memperlihatkan bahwa *framing* bukan hanya sekadar teknik penulisan berita, tetapi juga mencerminkan posisi ideologis dan orientasi media tersebut. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa setiap media memiliki agenda setting yang dapat memengaruhi pembentukan persepsi publik. Oleh karena itu, publik perlu meningkatkan literasi media agar tidak mudah terprovokasi atau terjebak pada informasi yang bias dan sepihak.

Pada akhirnya, melalui analisis *framing* ini, penelitian berupaya memberikan kontribusi dalam mengedukasi masyarakat untuk lebih peka terhadap praktik *framing* dalam pemberitaan. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga mampu melakukan evaluasi kritis terhadap setiap narasi yang dihadirkan media. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi studi-studi sejenis di masa depan, terutama dalam mengkaji pemberitaan isu-isu kebijakan publik yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat di daerah.

Tabel 4.27. Perbandingan Pembingkai Penolakan Makan Bergizi Gratis di Papua pada Media Kompas.com dan Jubi Papua

Perangkat <i>Framing</i>	Kompas.com	Jubi Papua
<i>Define Problem</i>	Kompas.com membingkai penolakan Makan Bergizi Gratis di Papua sebagai persoalan sosial yang dapat mengganggu jalannya kebijakan prioritas pemerintah untuk meningkatkan gizi anak-anak di Papua. Kompas.com fokus pada peristiwa protes pelajar dan dampaknya terhadap	Jubi membingkai penolakan program Makan Bergizi Gratis di Papua sebagai masalah ketidakcocokan kebijakan pemerintah pusat dengan kebutuhan di Papua. Jubi menyoroiti aksi pelajar sebagai bentuk keresahan terhadap fokus pengembangan SDM Papua yang dinilai salah.

Perangkat Framing	Kompas.com	Jubi Papua
Diagnoses Causes	<p>pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.</p> <p>Kompas.com cenderung menyoroti penyebab penolakan Makan Bergizi Gratis di Papua sebagai akibat dari komunikasi yang kurang efektif dan pemahaman yang belum merata oleh pemerintah kepada masyarakat Papua. Media menekankan sudut pandang pemerintah dan aparat bahwa masalah muncul karena minimnya sosialisasi dan miskomunikasi, meskipun Kompas.com juga menampilkan alasan dari pihak pelajar soal masalah pendidikan dan kemiskinan.</p>	<p>Jubi menyoroti penyebab masalah adalah kebijakan Makan Bergizi Gratis lahir <i>top-down</i>, sentralistis, mengabaikan aspirasi masyarakat lokal, dan memotong anggaran Otsus Pendidikan. Media juga menggarisbawahi kurangnya partisipasi publik dan pengabaian sosial-budaya Papua.</p>
Make Moral Judgment	<p>Kompas.com membingkai program Makan Bergizi Gratis sebagai kebijakan yang mempunyai niat baik dan penting bagi masa depan generasi muda di Papua. Penolakan diartikan sebagai hal wajar karena informasi belum tersampaikan dengan baik. Tetapi, untuk aksi demo lebih baik dihindari.</p>	<p>Jubi membingkai penolakan Makan Bergizi Gratis sebagai hak yang sah bagi pelajar dan masyarakat untuk menolak program yang dianggap tidak adil, dan juga menyoroti adanya intimidasi dari aparat sebagai pelanggaran kebebasan berpendapat. Media jubi memperlihatkan sikap simpatik kepada pelajar dan menegaskan pentingnya keadilan untuk Pendidikan.</p>
Treatment Recommendation	<p>Kompas.com cenderung membingkai penyelesaian masalahnya dengan melakukan edukasi lebih, sosialisai, pendekatan persuasif oleh pemerintah daerah, dan evaluasi kebijakan agar program Makan Bergizi Gratis bisa diterima dengan baik.</p>	<p>Jubi mendorong evaluasi atau penghentian Makan Bergizi Gratis, membuka ruang diskusi, dan mendesak pengalihan anggaran ke Pendidikan gratis, serta perbaikan sarana dan prasarana, seperti penambahan guru.</p>

Sumber: Olahan Peneliti

Tabel diatas menunjukkan perbandingan hasil analisis terkait pemberitaan penolakan Makan Bergizi Gratis di Papua pada media Kompas.com dan Jubi Papua. Tabel diatas menunjukkan bagaimana kedua media tersebut mem*framing* pemberitaan dengan elemen-elemen dari Robert Entman.

Pada media Kompas.com membingkai pemberitaan penolakan Makan Bergizi Gratis di Papua dengan elemen *define problem* yang menjelaskan bahwa Kompas.com secara konsisten membingkai konflik atau aksi demonstrasi penolakan Makan Bergizi Gratis di Papua bukan sebagai hal yang besar, tetapi sebagai bentuk gangguan sosial yang dapat menghambat berjalannya program Makan Bergizi Gratis yang diberikan oleh pemerintah pusat. Dari ketigabelas berita, fokus Kompas.com tertuju pada aksi rotes pelajar, aksi demo damai, sampai bentrok yang terjadi dengan aparat. Selain itu, menyoroti bagaimana situasi dan kondisi dilapangan mempengaruhi pelaksanaan Makan Bergizi Gratis. Kompas.com juga beberapa kali menampilkan narasi bahwa aksi pelajar ini berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak luar yang memiliki kepentingan tertentu, sehingga memperkeruh situasi dan memperbesar ketegangan yang terjadi.

Sedangkan pada media Jubi Papua membingkai pemberitaan penolakan Makan Bergizi Gratis dengan elemen *define problem* yang menjelaskan bahwa Jubi konsisten membingkai isu penolakan Makan Bergizi Gratis bukan hanya sekedar aksi protes biasa, melainkan adanya ketidakcocokan antara kebijakan pemerintah pusat dengan kebutuhan pelajar Papua. Jubi menunjukkan bahwa Makan Bergizi Gratis dipersepsikan tidak relevan akrena berbeda dengan prioritas Pendidikan gratis yang lebih mendesak. Fokus Jubi dengan penggunaan kutipan dari pelajar, tokohh adat, guru, dan LBH Papua memperkuat pendefinisian masalah sebagai keresahan masyarakat lokal dengan adanya kebijakan pemerintah pusat yang tidak sesuai dengan kebutuhan daerah.

Pada elemen kedua, yaitu *diagnoses causes*. Kompas.com membingkai penyebab ini lebih banyak menonjolkan narasi dari pihak pemerintah dan aparat. Menyatakan bahwa penolakan muncul karena masyarakat belum paham tujuan dari program Makan Bergizi Gratis. Hal ini dikarenakan minimnya sosialisasi, baik dari pemerintah pusat maupun pemerindah daerah. Sementara penyebab aksi demo yang

dilihat dari sisi pelajar seperti biaya sekolah mahal, buta huruf tinggi, dan kemiskinan tetap ditampilkan oleh media dengan porsi yang lebih sedikit.

Sedangkan pada media Jubi Papua, *diagnoses causes* yang ditampilkan secara konsisten menekankan penyebab dari penolakan Makan Bergizi Gratis, yaitu karena mekanisme atau kebijakan Makan Bergizi Gratis yang sentralistis dan *top-down*. Jubi juga menyoroti tidak adanya proses konsultasi, kurangnya sosialisasi, dan pengalihan dana Otsus yang dikurangi untuk Pendidikan. Berita-berita dari Jubi juga selalu menampilkan narasumber yang menilai pemerintah gagal dalam membaca masalah Pendidikan di Papua.

Pada elemen yang ketiga, *make moral judgment* dari media Kompas.com tidak secara langsung mengatakan benar dan tidaknya. Kompas.com melakukan penilaian moral melalui cara kutipan yang berisi seperti, Makan Bergizi Gratis selalu disebut sebagai program baik dan berhak dinikmati oleh anak-anak. Kompas.com juga menarasikan bahwa penolakan seharusnya tidak mengganggu hak orang lain, apalagi sampai memicu kekerasan.

Sedangkan pada media Jubi, *memframing* penilaian moral cenderung membela dan memvalidasi aksi pelajar sebagai hak untuk berpendapat. Jubi memperlihatkan sikap yang kritis pada tindakan aparat karena melakukan penangkapan dan intimidasi. Sedangkan memposisikan pelajar sebagai pihak yang patut didengar aspirasinya. Penekanan moral Jubi terletak pada nilai keadilan pendidikan: Makan Bergizi Gratis dianggap menyalahi keadilan sosial karena hanya pencitraan, sementara masalah riil diabaikan.

Pada elemen yang terakhir, *treatment recommendation* pada Kompas.com meringkai penyelesaian masalah penolakan Makan Bergizi Gratis di Papua bukan dengan menghentikan programnya, tetapi dengan mengedepankan evaluasi, membeirkan penjelasan, membuka ruang diskusi, dan pendekatan keamanan. Di beberapa berita juga disebutkan, saran penegakan hukum untuk pihak yang melakukan kekerasan atau ancaman.

Sedangkan pada media Jubi, dari keseluruhan beritanya mengarahkan pembaca kepada satu benang merah, yaitu kebijakan Makan Bergizi Gratis perlu di evaluasi, dialihkan untuk biaya Pendidikan gratis, dan memperbaiki sarana dan prasarana sekolah, seperti infrastruktur dan penambahan tenaga pengajar. Jubi juga

menampilkan solusi untuk mendengarkan usulan pelajar dengan cara membuka diskusi dan tidak dibungkam. Selain itu, Jubi juga mengutip pernyataan dari LBH Papua yang menegaskan bahwa tindakan kekerasan terhadap pelajar tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan konstitusi dan prinsip perlindungan hak anak serta kebebasan berekspresi.

Berdasarkan hasil analisis *framing* terhadap pemberitaan penolakan program Makan Bergizi Gratis di Papua oleh media Kompas.com dan Jubi Papua, dapat diartikan bahwa kedua media memiliki sudut pandang yang berbeda secara signifikan dalam membingkai isu tersebut. Kompas.com, sebagai media nasional, secara konsisten membingkai penolakan Makan Bergizi Gratis sebagai bentuk gangguan sosial yang berpotensi menghambat pelaksanaan program yang digagas pemerintah pusat. *Framing* ini terlihat dari fokus pemberitaannya yang lebih menyoroti aksi demonstrasi para pelajar, mulai dari bentuk protes damai hingga bentrokan dengan aparat keamanan di lapangan. Selain itu, Kompas.com menekankan kondisi sosial-politik di wilayah Papua yang dinilai memengaruhi jalannya program tersebut.

Menariknya, dalam beberapa berita, Kompas.com juga menyisipkan narasi bahwa aksi para pelajar ini tidak sepenuhnya murni, melainkan berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan terselubung, sehingga memperkeruh situasi dan memicu ketegangan antara masyarakat dan aparat. Hal ini memperlihatkan bahwa *framing* Kompas.com cenderung memperkuat sudut pandang pemerintah pusat dengan meminimalkan masyarakat lokal yang menjadi latar belakang penolakan.

Sementara itu, Jubi Papua justru mengambil pendekatan yang berbeda. Sebagai media lokal yang berbasis di Papua, Jubi membingkai penolakan terhadap program Makan Bergizi Gratis sebagai bentuk ekspresi keresahan masyarakat lokal, khususnya pelajar, terhadap kebijakan pemerintah pusat yang dianggap tidak sesuai dengan realitas dan kebutuhan masyarakat Papua. Dalam pemberitaannya, Jubi lebih banyak memberikan ruang kepada narasumber yang mewakili masyarakat terdampak langsung, seperti pelajar, guru, tokoh adat, hingga Lembaga Bantuan Hukum Papua. Melalui kutipan-kutipan tersebut, Jubi mengangkat kritik terhadap kebijakan yang dianggap terlalu sentralistik dan mengabaikan kebutuhan mendesak

di sektor pendidikan, seperti mahalnya biaya sekolah, minimnya infrastruktur pendidikan, kekurangan guru, hingga kebutuhan mendasar berupa pendidikan gratis.

Framing yang dibangun Jubi tidak sekadar menyampaikan fakta demonstrasi, tetapi juga menekankan substansi masalah dan kegelisahan struktural yang dirasakan masyarakat setempat. Narasi ini diperkuat dengan penekanan terhadap nilai-nilai keadilan sosial dan hak berpendapat. Bahkan, Jubi mengangkat pernyataan dari LBH Papua yang menyatakan bahwa tindakan represif terhadap pelajar bertentangan dengan konstitusi dan mencederai prinsip perlindungan anak dan kebebasan berekspresi.

Meskipun demikian, bahwa isu penolakan program Makan Bergizi Gratis di Papua termasuk dalam kategori isu minor di media daring. Hal ini tercermin dari jumlah berita yang terbatas, baik di Kompas.com maupun Jubi Papua, mengenai topik ini. Fakta tersebut menunjukkan bahwa isu ini tidak memperoleh perhatian besar dalam pemberitaan media nasional maupun lokal, dan cenderung tersisihkan dengan isu-isu lain yang lebih populer secara politik dan ekonomi. Minimnya intensitas pemberitaan ini berpotensi menyebabkan publik tidak mendapatkan gambaran utuh mengenai ketegangan sosial yang terjadi di Papua terkait pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat. Kondisi ini menunjukkan bagaimana seleksi redaksional dan prioritas pemberitaan dapat membentuk persepsi publik terhadap penting tidaknya suatu isu sosial.

Dalam konteks nilai berita *proximity*, Jubi Papua menunjukkan keterlibatan yang lebih kuat dan mendalam dibandingkan Kompas.com. *Proximity* dalam jurnalisme tidak hanya berkaitan dengan jarak geografis, tetapi juga kedekatan secara emosional, sosiologis, dan kultural antara media, peristiwa, dan audiensnya. Jubi, sebagai media lokal yang beroperasi di Papua, memiliki keunggulan dalam hal akses langsung terhadap narasumber, pemahaman terhadap kondisi sosial masyarakat Papua, dan kedekatan ideologis dengan suara-suara masyarakat adat serta kelompok marjinal.

Jubi juga berawal dari sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memiliki fokus utama pada isu-isu hak asasi manusia, keadilan, dan demokrasi di Papua. Latar belakang ini menjadikan Jubi memiliki kepekaan tinggi terhadap

ketimpangan sosial dan lebih berpihak pada kelompok yang tidak memiliki cukup ruang di media arus utama. Oleh karena itu, meskipun jumlah beritanya tidak sebanyak isu lainnya, pendekatan *framing* yang dilakukan Jubi Papua lebih kritis, tajam, dan memperlihatkan sosial serta struktural yang tidak tersentuh oleh media nasional seperti Kompas.com. Hal ini membuktikan bahwa nilai *proximity* tidak hanya menentukan seberapa penting suatu isu bagi media, tetapi juga memengaruhi kedalaman dan arah *framing* terhadap isu tersebut.

